

# LAPORAN KINERJA BNSP

Tahun



**SINERGI  
SERTIFIKASI  
KOMPETENSI  
MELALUI  
HARMO-  
NISASI**

LAPORAN  
KINERJA  
B N S P

Tahun

2021

**SINERGI  
SERTIFIKASI  
KOMPETENSI  
MELALUI  
HARMONISASI**

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Laporan Kinerja 2021

## **Sinergi Sertifikasi Kompetensi Melalui Harmonisasi**

©2021 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

---

**Pengarah** : Kunjung Masehat, S.H., M.M.  
**Penanggung Jawab** : Miftakul Azis, M.H.  
**Penyelia** : Drs. Mulyono, M.H.  
Bonardo Aldo Tobing, BSBA.  
Tetty Desiarti Soemarso, S.ST.Par., M.Par.  
Henny S. Widyaningsih, M.Si.  
Drs. Muhammad Zubair, M.Si. A.I.S  
**Koordinator** : Henny S. Widyaningsih, M.Si.  
**Tim Penulis** : Tim Data dan Informasi  
**Editor** : Bambang Trimansyah  
**Desainer** : Den Binikna

---

Cetakan I, Mei 2022

viii hlm. + 72 hlm.; 21 x 29,7 cm

Font yang pakai: Mulish oleh Vernon Adams, Cyreal, Jacques Le Bailly. 12,5 pt.

Diterbitkan oleh

**Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)**

Jl. Letjen MT Haryono Kav. 52,

RT.3/RW.4, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630

Telepon: 021-7992685

E-mail: [admin@bnsf.go.id](mailto:admin@bnsf.go.id)

Website: [bnsf.go.id](http://bnsf.go.id)

# Kata Pengantar Ketua BNSP

Tahun penuh kesulitan dan keprihatinan telah kita lewati, yakni tahun 2020 ketika pandemi global COVID-19 akhirnya juga melanda Indonesia. Krisis tiba-tiba itu setidaknya memengaruhi kinerja lembaga pemerintah, tidak terkecuali BNSP. Akan tetapi, di satu sisi juga mendorong BNSP segera beradaptasi dengan komitmen tetap melayani kegiatan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Selain itu, BNSP juga tengah bertransformasi menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Meskipun pandemi belum mereda sepenuhnya, tahun 2021 menyiratkan harapan untuk bangkit di berbagai sektor sebagai upaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak COVID-19 menyebar. Kondisi menuju kenormalan baru juga berpengaruh pada mulai masuknya kita pada tatanan baru. Berbagai sektor industri dan profesi kembali menata diri. BNSP pun menerima berbagai uluran tangan untuk bersinergi terkait sertifikasi melalui harmonisasi.

Untuk itu, dalam Laporan Kinerja BNSP 2021 ini diangkat tema “Sinergi Sertifikasi Kompetensi Melalui Harmonisasi”. BNSP pada tahun 2021 lebih menguatkan harmonisasi antarlembaga di berbagai sektor untuk menyiapkan SDM-SDM andal Indonesia yang tersertifikasi.

Perjalanan meniti krisis pada tahun 2020 menjadi evaluasi pada tahun 2021 sehingga BNSP semakin memantapkan peranannya dalam sertifikasi kompetensi dan profesi demi melahirkan SDM-SDM yang kompeten dan berdaya saing secara internasional. Dengan semangat harmonisasi ini, BNSP juga mendorong asosiasi profesi, lembaga bisnis dan jasa, serta lembaga/kementerian

pemerintah untuk menggagas sertifikasi profesi. Karena itu, BNSP memaklumkan semboyan baru, yakni *sertifikasikan profesimu*.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, BNSP tetap optimistis mengawal program sertifikasi kompetensi/profesi di berbagai sektor. Selain itu, semangat Presidensi G20 pada tahun 2022 juga menyiratkan optimisme Indonesia untuk mampu memainkan peranannya secara global guna memulihkan perekonomian melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menghargai antarnegara dengan kemampuan ekonomi yang lebih kukuh secara berkelanjutan.

Akhir kata, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja BNSP Tahun 2021 ini kami sampaikan sebagai dokumen resmi yang digunakan untuk evaluasi, *lesson learned* dari masa sebelumnya, dan manajemen pengetahuan untuk kita bersama. Kami berterima kasih atas kerja sama yang baik selama ini, antara BNSP dan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta lainnya.

Jakarta, Desember 2021

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

**Kunjung Masehat, S.H., M.M.**

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja BNSP Tahun 2021 mengusung tema “Sinergi Sertifikasi Kompetensi Melalui Harmonisasi” dengan menampilkan aktivitas BNSP di bidang sertifikasi. Secara khusus, tahun 2021 ini menyajikan langkah harmonisasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan asosiasi/perkumpulan profesi, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Krisis akibat pandemi global COVID-19 masih mewarnai aktivitas pada tahun 2021, tetapi keadaan yang berangsur-angsur membaik telah meningkatkan kembali kegiatan sertifikasi. Namun, kinerja BNSP juga sangat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia sehingga berdampak pada pencapaian target. Tahun 2021 tercatat BNSP menerima anggaran terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari pagu awal anggaran sebesar Rp134.204.396.000 menjadi Rp86.911.383.000 setelah dilakukan revisi anggaran. Penyesuaian anggaran ini tentu berdampak pada target pencapaian kinerja secara umum.

Dapat disebutkan di sini, kinerja BNSP tahun 2021 membuahkan total sertifikasi profesi di berbagai sektor sebanyak 830.986 orang

atau meningkat lebih dari 30% dari tahun 2020 (593.892 orang). Hal ini juga disebabkan terjadinya pemulihan di berbagai sektor pascagelombang pandemi COVID-19.

Berdasarkan data Sumber Daya Sertifikasi 2021, terdapat 51.101 orang asesor yang terdaftar, 114 master asesor, dan 21.623 tempat uji kompetensi (TUK). Adapun jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) pada tahun 2021 terdapat 1.408 kategori LSP P1, 93 kategori LSP P2, dan 320 kategori LSP P3. Total LSP tersebar di 34 provinsi sebanyak 1.821 LSP.

Selain pelayanan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, BNSP juga melakukan harmonisasi dengan berbagai lembaga untuk memfasilitasi kegiatan sertifikasi di berbagai sektor, terutama sektor-sektor yang menjadi prioritas sertifikasi. Pada tahun 2021, BNSP memaklumkan semboyan baru, yakni *sertifikasikan profesimu* sebagai wujud semangat harmonisasi di berbagai sektor industri dan profesi.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR KETUA BNSP . . . . .	III
RINGKASAN EKSEKUTIF . . . . .	V
<b>BAB I PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang . . . . .	2
B. Kondisi Umum Tahun 2021 . . . . .	3
C. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BNSP . . . . .	4
D. Struktur Organisasi BNSP . . . . .	5
E. SDM BNSP. . . . .	7
<b>BAB II PROFIL BNSP . . . . .</b>	<b>9</b>
A. Sejarah Pembentukan BNSP . . . . .	10
B. Dasar Hukum Peran Strategis BNSP. . . . .	11
C. Sarana dan Prasarana. . . . .	12
D. Jenis Layanan BNSP . . . . .	15
1. Lisensi . . . . .	15
2. Relisensi . . . . .	15
3. Penambahan Ruang Lingkup (PRL) . . . . .	15
4. Sertifikasi . . . . .	15
5. Data Informasi. . . . .	15
6. Pengembangan SDM Sertifikasi . . . . .	16
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA . . . . .</b>	<b>17</b>
A. Kinerja Bidang Lisensi . . . . .	18
1. Perkembangan LSP Terlisensi Tahun 2021 . . . . .	18
2. Asesor Lisensi . . . . .	19
3. Surveilans LSP. . . . .	21
4. Pelatihan/Bimtek Asesor dan LSP . . . . .	21
a. <i>Workshop</i> Pemetaan Skema. . . . .	21
b. <i>Workshop</i> Asesor Lisensi Angkatan I. . . . .	22
c. Bimtek Penyusunan Dokumen LSP . . . . .	24
5. Konsinyasi Verifikasi Skema . . . . .	25
6. Penyusunan Modul . . . . .	26
B. Kinerja Bidang Sertifikasi . . . . .	26
1. Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Dana BNSP . . . . .	26
2. Magang Calon Master Asesor dan Sertifikasi Master Asesor . . . . .	27
3. RCC Master Asesor . . . . .	28
4. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) . . . . .	31

C.	Kinerja Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum . . . . .	32
1.	Kerja Sama Antarlembaga. . . . .	33
a.	Pengesahan Skema Sertifikasi KKNi Bidang Kadastral . . . . .	33
b.	Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupasi Bidang Logistik dan <i>Supply Chain</i> . . . . .	34
c.	Penandatanganan Nota Kesepahaman Sertifikasi di Bidang Penanggulangan Bencana. . . . .	35
d.	Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Talenta Digital dan Digital Hub . . . . .	35
2.	Diseminasi Peraturan BNSP . . . . .	37
3.	Harmonisasi Sertifikasi dengan Lembaga/Kementerian . . . . .	39
a.	Rapat Teknis Harmonisasi Sertifikasi Bidang K3 . . . . .	39
b.	Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga . . . . .	40
c.	Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Antara BNSP dengan Dewan Pers . . . . .	43
d.	BNSP Jalin Kerja Sama Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan LPJK . . . . .	45
4.	Penyebaran Surat Edaran . . . . .	47
5.	Penerapan ASEAN Guiding Principles (AGP) . . . . .	48
6.	Kerja Sama Bilateral/Multilateral . . . . .	49
a.	Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) . . . . .	49
b.	Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA) . . . . .	50
c.	Perundingan Putaran Kedua Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement/IUAE-CEPA) . . . . .	52
d.	Pertemuan Bilateral Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile (IC-CEPA) . . . . .	53
e.	Partisipasi pada APEC 68 <sup>th</sup> Group on Services Meeting . . . . .	54
f.	Partisipasi pada SLOM-WG ke-14 . . . . .	56
g.	Partisipasi pada Annual Meeting of the APO Accreditation Body Council (APO) . . . . .	59
D.	Kinerja Bidang Data dan Informasi. . . . .	61
1.	Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP . . . . .	61
2.	Promosi. . . . .	62
3.	Pengembangan Situs Web . . . . .	62
E.	Gambaran Kinerja Secara Umum. . . . .	63
1.	Kinerja Keuangan . . . . .	63
2.	Sumber Daya Sertifikasi 2021. . . . .	66

**BAB IV PENUTUP . . . . . 71**



**BAB**

**I**

# **PENDAHULUAN**



## A. Latar Belakang

Pandemi global COVID-19 masih melanda Indonesia pada tahun 2021. Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 telah melakukan gerak cepat antisipasi dampak pandemi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dampak Program PEN dapat dirasakan dengan mulai membaiknya perekonomian menjelang tahun 2022.

Indonesia telah berusaha keluar dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh faktor di luar perkiraan. Karena itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tergolong sebagai kebijakan di luar kebiasaan (*extraordinary*) dengan mempertimbangkan kemampuan negara dan bangsa untuk bertahan lalu bangkit secara perlahan.

Isu-isu ketenagakerjaan tahun 2021 masih melatari Indonesia. Isu ini pula yang dianalisis dan diperhitungkan untuk dibawa ke dalam forum internasional Presidensi G20 pada tahun 2022.

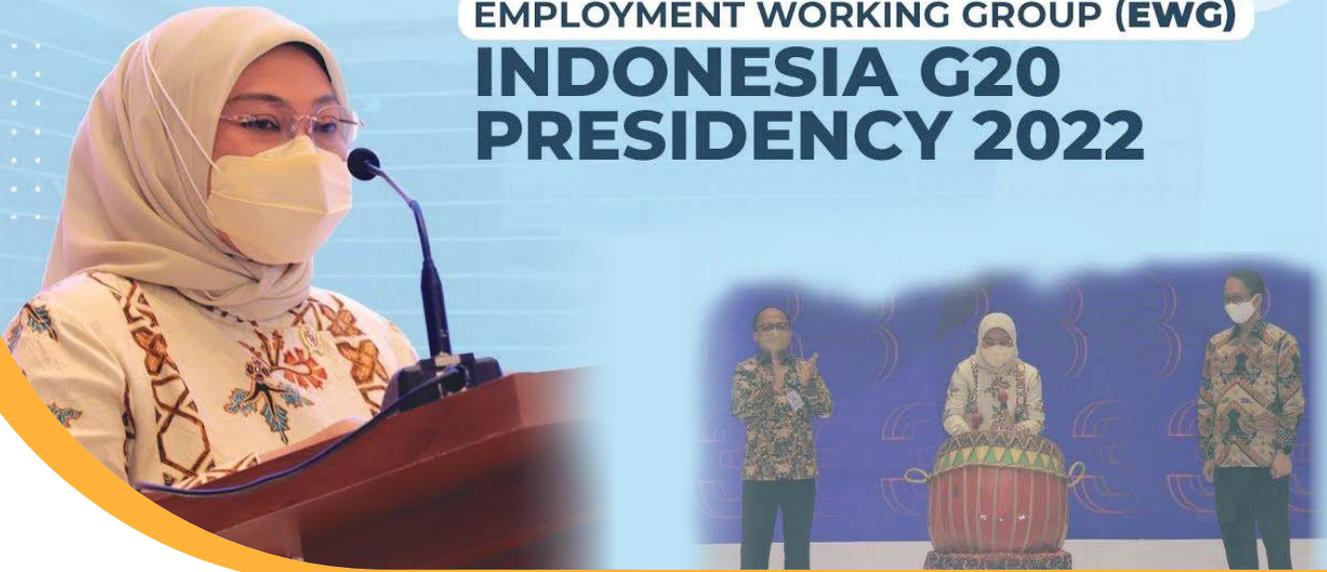
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyodorkan empat isu prioritas untuk diusung dalam Presidensi Indonesia pada ajang G20 tahun 2022. Pertama, *Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work* (Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja). Kedua, *Inclusive Labour Market and Job Quotas for people with Disabilities* (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas). Ketiga, *Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity* (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan). Keempat, *Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work* (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja). Keempat isu itu sesuai dengan tajuk yang diusung G20, yaitu *Improving the Employment Condition to Recover Together* (Memperbaiki Kondisi Ketenagakerjaan untuk Kembali Pulih Bersama).

# KICK OFF

## EMPLOYMENT WORKING GROUP (EWG)

# INDONESIA G20

# PRESIDENCY 2022



Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI berkepentingan terhadap isu ketiga, yaitu Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan. Kepentingan ini terutama menyangkut kesiapan sistem sertifikasi nasional untuk beberapa sektor prioritas yang memerlukan pasokan SDM unggul dan tersertifikasi.

Untuk itu, menyongsong Program PEN dan upaya membangkitkan kembali perekonomian Indonesia, BNSP membuka diri terhadap terjalinnya sinergi dan harmonisasi dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, industri, serta masyarakat profesi secara luas. Laporan Kinerja BNSP Tahun 2021 ini menjadi gambaran langkah-langkah yang dilakukan BNSP.

## **B. Kondisi Umum Tahun 2021**

Sebagaimana telah disampaikan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada situasi gelombang pandemi COVID-19. Pemerintah secara serius melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di berbagai sektor, terutama sektor-sektor strategis. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 sangat memengaruhi mobilitas, termasuk di BNSP.

**Gambar 1.** Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyampaikan empat isu prioritas ketenagakerjaan dalam Kick Off Employment Working Group (EWG) Indonesia G20 Presidency 2022.

Walaupun demikian, situasi mulai terkendali pada akhir 2021 dengan melandainya kasus persebaran COVID-19 dan meningkatnya kesembuhan akibat COVID-19. Indonesia digambarkan sedang menuju fase endemi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2022. Oleh sebab itu, di dalam laporan ini tergambar mulai meningkatnya aktivitas BNSP pada akhir tahun 2021 atau pada bulan Oktober, November, dan Desember. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi 2021 lebih kondusif terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

### **C. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BNSP**

BNSP lahir dari kebutuhan pentingnya meningkatkan kualitas tenaga kerja atau SDM di Indonesia. Status kelembagaan BNSP saat ini merupakan badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. BNSP berwenang sebagai otoritas sertifikasi personel yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja di Indonesia.

Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas di Indonesia. Merujuk pada sejarah, gagasan paradigma baru ini didasari oleh dua prinsip utama, yaitu (1) penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (*demand driven*); dan (2) proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training/CBT*). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini mulai dilaksanakan pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Umum Kadin Indonesia. SKB ini juga menjadi titik tolak penguatan peran kelembagaan BNSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada tanggal 5 Maret 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Terbitnya PP ini menandai babak baru peran strategis BNSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia dan sebagai badan independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagai pengembang otoritas sertifikasi kompetensi kerja, BNSP melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan dan mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
2. melaksanakan dan mengembangkan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
3. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
4. mengembangkan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
5. melaksanakan dan mengembangkan kerja sama antarlembaga, baik nasional maupun internasional di bidang sertifikasi profesi; dan
6. melaksanakan dan mengembangkan sistem data serta informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

#### **D. Struktur Organisasi BNSP**

Organisasi BNSP saat ini dikelola oleh tujuh Komisioner BNSP. Perangkat organisasi BNSP terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang membawahkan bidang. Saat ini ada lima bidang di dalam tubuh organisasi BNSP, yaitu (1) Bidang Lisensi; (2) Bidang Sertifikasi; (3) Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum; (4) Bidang Data dan Informasi; dan (5) Bidang Pengembangan SDM.

Berikut ini adalah susunan organisasi BNSP periode 2018–2023.

Ketua	: Kunjung Masehat, S.H., M.M.
Wakil Ketua	: Miftakul Azis, M.H.
Anggota Bidang Lisensi	: Drs. Mulyanto, M.M.
Anggota Bidang Sertifikasi	: Bonardo Aldo Tobing, BSBA
Anggota Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum	: Tetty D.S. Ariyanto, S.ST. Par, M.Par
Anggota Bidang Data dan Informasi	: Henny S. Widyaningsih, M.Si.
Anggota Bidang Pengembangan SDM	: Drs. Muhammad Zubair, M.Si. AIIS

## Struktur Organisasi



## **E. SDM BNSP**

Selain ketujuh komisioner yang bekerja atas dasar ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Sekretariat atau kantor BNSP saat ini didukung oleh SDM profesional untuk menjalankan visi dan misi BNSP guna mencapai target di dalam sistem sertifikasi kompetensi.





**BAB**

**II**

# **PROFIL BNSP**



## A. Sejarah Pembentukan BNSP

Cikal bakal berdirinya BNSP bermula dari pembentukan dua lembaga pemerintah pada tahun 1990-an. Lembaga pertama ialah Dewan Latihan Kerja Nasional (DLKN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1990. DLKN bertujuan memberikan rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja tentang peningkatan kualitas tenaga kerja.

Lembaga kedua adalah Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) yang dibentuk berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kadin Indonesia. MPKN bertujuan mewujudkan *link & match* antara pendidikan menengah vokasi (SMK) dan industri.

Mengingat adanya kesamaan tujuan antarkedua lembaga itu maka digagaslah penyatuan kedua lembaga menjadi Badan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Profesi (BN3P). Pembentukan BN3P dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Ketua Kadin Indonesia. SKB ditandatangani secara resmi pada tanggal 15 Mei 2000.

BN3P berperan signifikan ketika DPR-RI menggodok RUU Ketenagakerjaan dan Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bagian mengenai Pelatihan Kerja sangat diwarnai oleh konsep BN3P, yakni keharusan tenaga kerja memiliki kompetensi, standar kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pasal tentang kewajiban lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) memiliki sertifikat kompetensi di samping ijazah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ketiga produk regulasi itu merupakan kesatuan Sistem Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi. Pada

sistem tersebut terdapat tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi, program diklat berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Setahun setelah PP Nomor 23 Tahun 2004 dikeluarkan, BNSP resmi berdiri pada bulan Juli 2005 yang ditandai dengan pengukuhan kepengurusan BNSP oleh Menteri Tenaga Kerja atas nama Presiden. BNSP merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di dalam kepengurusan BNSP terdapat unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Selanjutnya, organisasi BNSP mengalami penguatan dan perubahan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peraturan Pemerintah ini otomatis menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Perubahan mendasar dari terbitnya PP ini salah satunya terletak pada jumlah anggota BNSP yang semula sebanyak-banyaknya 23 orang menjadi hanya 7 orang.

## **B. Dasar Hukum Peran Strategis BNSP**

Peran strategis BNSP sebagai lembaga independen yang melaksanakan Sistem Sertifikasi Kompetensi secara nasional dilandasi oleh regulasi berikut ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 18 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Uji Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri Tahun 2020.

### **C. Sarana dan Prasarana**

Aktivitas BNSP didukung oleh Kantor Sekretariat BNSP yang berlokasi di Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan. Saat ini, Sekretariat BNSP telah memiliki sarana dan prasarana yang representatif untuk mendukung pelayanan optimal bagi para pemangku kepentingan sertifikasi kompetensi.

Dalam menjalankan tugas dan perannya, sekretariat BNSP yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang representatif untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pemangku kepentingan, instansi terkait, dan publik yang membutuhkan informasi, serta kerja sama dan pelayanan BNSP.

Berikut ini daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNSP.

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana BNSP Tahun 2021**

Sarana dan Prasarana	Fasilitas
Lantai 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Resepsionis</li> <li>• Lobi tamu</li> <li>• Musala</li> <li>• Ruang konsultasi</li> <li>• Toilet</li> </ul>
Lantai 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Rapat I BNSP</li> <li>• Ruang Rapat II BNSP</li> <li>• Ruang Kerja Anggota BNSP</li> </ul>
Lantai 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kerja Bidang Lisensi</li> <li>• Ruang Kerja Bidang Sertifikasi</li> <li>• Ruang Kerja Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum</li> <li>• Ruang Kerja Bidang Data dan Informasi</li> </ul>
Lantai 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Ketua BNSP</li> <li>• Ruang Wakil Ketua BNSP</li> </ul>



## D. Jenis Layanan BNSP

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BNSP memberikan layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam lingkup enam kegiatan berikut ini.

### 1. Lisensi

Lisensi diberikan kepada calon lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan dalam bentuk pengukuhan dan pemberian izin oleh BNSP melalui sertifikat lisensi LSP. Lisensi dapat digunakan dalam rentang (limitasi) empat tahun sehingga harus dilakukan relisensi.

### 2. Relisensi

Relisensi diberikan kepada LSP yang telah memiliki sertifikat lisensi berupa perpanjangan masa aktif lisensi LSP oleh BNSP.

### 3. Penambahan Ruang Lingkup (PRL)

Pengajuan permohonan LSP untuk menambah ruang lingkup sertifikasi berupa penyesuaian, pengurangan, dan/atau penambahan skema sertifikasi kompetensi.

### 4. Sertifikasi

Pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus. Hal ini termasuk pelayanan dalam sertifikasi berupa pengajuan pelatihan asesor, pelatihan RCC (*recognition current competency*), dan pengajuan blangko sertifikasi.

### 5. Data Informasi

Pelaksanaan dan pengembangan program pelayanan publik, publikasi, penguatan citra BNSP melalui penjenamaan (*branding*), dan pengembangan sistem informasi BNSP.

## 6. Pengembangan SDM Sertifikasi

Pelatihan asesor kompetensi, RCC asesor kompetensi, dan pelatihan master asesor.



**BAB**

**III**

# **CAPAIAN KINERJA**



## A. Kinerja Bidang Lisensi

Kinerja Bidang Lisensi menggambarkan perkembangan LSP terlisensi setiap tahun, asesor dan master asesor terlisensi, dan kegiatan surveilans LSP. Berikut ini gambaran perkembangan LSP, asesor, dan master asesor terlisensi BNSP.

### 1. Perkembangan LSP Terlisensi Tahun 2021

Pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Lisensi adalah memberikan layanan proses pendelegasian kewenangan sertifikasi dari BNSP ke LSP melalui akreditasi LSP. Pada tahun 2021, jumlah LSP terlisensi pada tahun 2021 sebanyak 356 LSP. Pengesahan LSP terbanyak adalah LSP P1 sebanyak 122 yang terdiri atas LSP lembaga pendidikan, yaitu SMK, politeknik, universitas, lembaga diklat, dan industri. Kemudian, LSP P2 yang didirikan oleh BLK, lembaga diklat, instansi pemerintah, dan industri, total sejumlah 9 LSP. Disusul oleh LSP P3 sebanyak 47 LSP.

**Tabel 2. LSP Terlisensi Tahun 2021**

Bulan	LSP P1	LSP P2	LSP P3	Jumlah
Januari	8		3	11
Februari	13			13
Maret	17	4	6	27
April	15	1	3	19
Mei	16		5	21
Juni	6	1	4	11
Juli	6	1	4	11
Agustus	7		5	12
September	6			6
Oktober	4	2	8	14

Bulan	LSP P1	LSP P2	LSP P3	Jumlah
November	8		1	9
Desember	16		8	24
JUMLAH	122	9	47	178
<b>TOTAL JUMLAH LSP</b>				<b>356</b>

Berdasarkan pertumbuhan LSP baru tahun 2021 sebanyak 356 LSP maka total jumlah LSP terlisensi BNSP hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.821 LSP. Pertumbuhan LSP tahun 2021 meningkat daripada tahun 2020 dengan jumlah total LSP terlisensi sebanyak 258 LSP.

## 2. Asesor Lisensi

Kegiatan Pelatihan Asesor Lisensi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pelatihan Pengelolaan LSP Angkatan II yang diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 20 November 2021 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta. Terdapat sebanyak 20 orang peserta Pelatihan Asesor Lisensi yang berasal dari lingkungan pegawai Sekretariat BNSP. Peserta itu ialah para ketua/direktur LSP. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yaitu Miftakul Azis. Pada saat pembukaan, ia menyampaikan agar para peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan ini, dapat menjadi asesor lisensi yang dalam menjalankan tugas asesmen lapangan kepada LSP sesuai dengan peraturan BNSP. Ia juga juga berharap para peserta dapat menerapkan mutu di LSP masing-masing sesuai dengan peraturan BNSP.



### 3. Surveilans LSP

Kegiatan Surveilans LSP berdasarkan Peraturan BNSP Nomor 3 Tahun 2014 dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan surveilans merupakan audit kinerja LSP untuk memastikan operasional LSP berpijak pada pedoman BNSP dan dapat memelihara lisensinya.

Tahun 2021 BNSP melakukan surveilans terhadap 30 LSP. Dengan demikian, 8,4% LSP telah disurveilans dari total jumlah 356 LSP pada 2021.

**Tabel 3. Kegiatan Surveilans LSP Tahun 2021**

No.	Jenjang	Jumlah LSP
1.	LSP P1	17 LSP
2.	LSP P2	3 LSP
3.	LSP P3	10 LSP

### 4. Pelatihan/Bimtek Asesor dan LSP

#### a. *Workshop* Pemetaan Skema

Kegiatan *Workshop* Pemetaan Skema dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni pada tanggal 24 sampai dengan 25 November 2021 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta. Acara *workshop* dihadiri oleh Kepala Sekretariat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek) yang diwakili oleh Direktorat Vokasi dan 30 peserta lainnya. Acara *workshop* dibuka oleh Kepala Sekretariat BNSP dan seluruh jajaran Sekretariat BNSP. Kegiatan ini membahas tentang skema sertifikasi SMK yang standarnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.



b. *Workshop Asesor Lisensi Angkatan I*

Kegiatan *Workshop Asesor Lisensi Angkatan I* berlangsung selama dua hari pada tanggal 29–30 November 2021 bertempat di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Kegiatan *workshop* ini melibatkan 160 peserta yang terdiri atas *lead* asesor lisensi, asesor lisensi, dan asesor lisensi muda (*observer*). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua BNSP dan dihadiri oleh semua anggota BNSP.

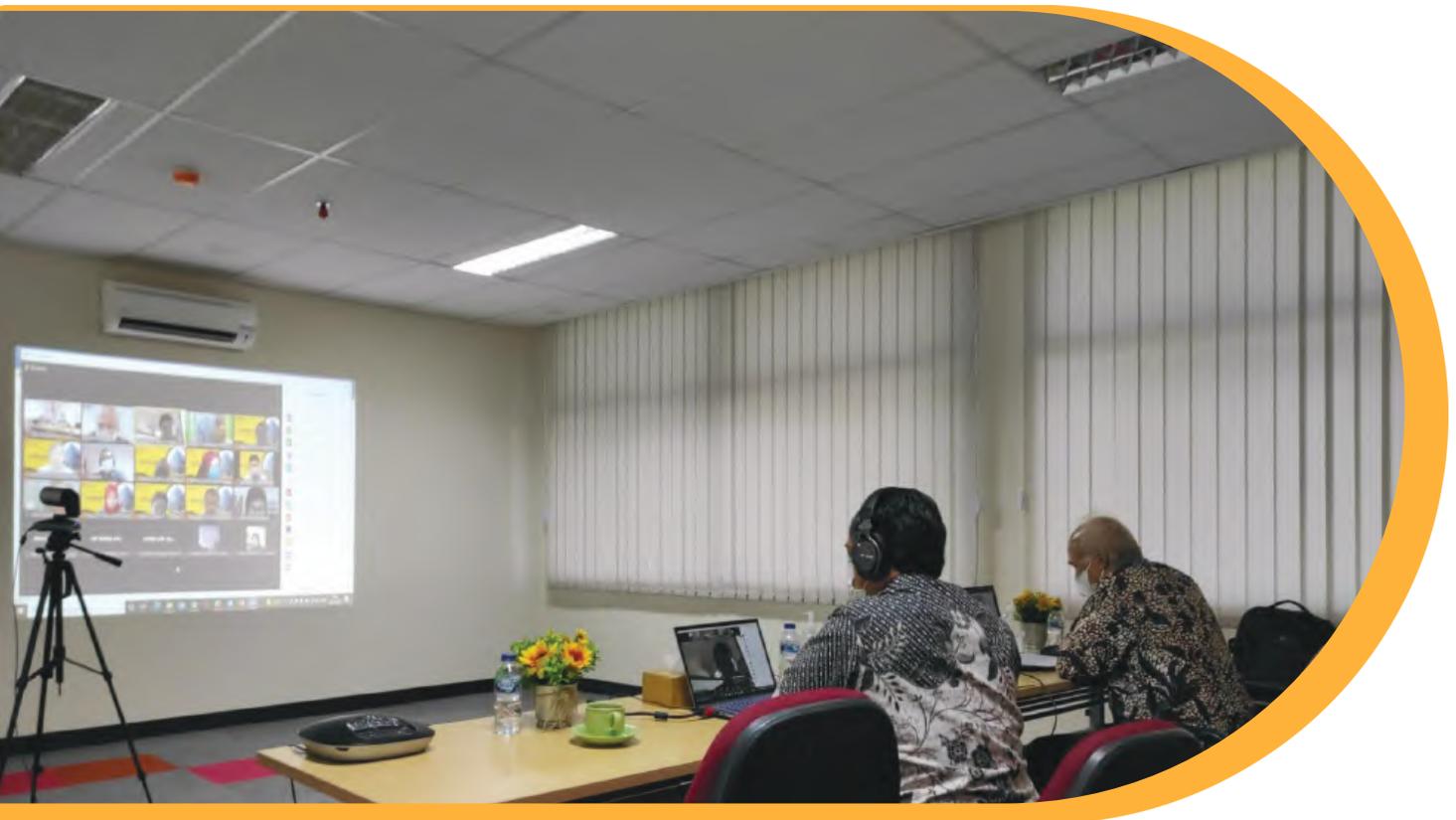
Penyelenggaraan *workshop* bertujuan menyampaikan beberapa informasi terkini terkait beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh BNSP. Kebijakan tersebut, di antaranya Surat Keputusan Ketua BNSP tentang Jabatan-Jabatan Okupasi Bidang Sertifikasi, penyesuaian SOP LSP ke SKKNI Nomor 333 tahun 2020, penerapan Toolbox ASEAN untuk sektor pariwisata, dan Surat Edaran di sektor konstruksi. Dengan demikian, diharapkan asesor lisensi pada saat melaksanakan tugas di LSP dapat menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BNSP.



c. Bimtek Penyusunan Dokumen LSP

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen LSP tahun 2021 dilaksanakan sebanyak dua kali untuk dua angkatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring selama dua hari per angkatan. Bimtek Penyusunan Dokumen Angkatan I dan Angkatan II dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 28 Juni–2 Juli 2021 berlokasi di Ruang Rapat BNSP Jakarta. Peserta kegiatan sebanyak 20 orang per angkatan.

Bimtek diikuti oleh peserta yang telah memenuhi persyaratan, yakni dari CLSP yang telah mengikuti kegiatan apresiasi sekurang-kurangnya dua tahun terakhir. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar LSP dapat mengimplementasikan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh LSP sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu pada saat akan mengajukan permohonan lisensi ke BNSP.



## 5. Konsinyasi Verifikasi Skema

Kegiatan Konsinyasi Verifikasi Skema dilaksanakan sebanyak enam kali sepanjang tahun 2021. Berikut data kegiatan Konsinyasi Verifikasi Skema:

- a. Konsinyasi I: 21-22 April 2021
- b. Konsinyasi II: 10-11 Mei 2021
- c. Konsinyasi III: 3-4 Juni 2021
- d. Konsinyasi IV: 24-25 Agustus 2021
- e. Konsinyasi V: 1-2 Desember 2021
- f. Konsinyasi VI: 3-4 Desember 2021

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas proses verifikasi skema yang telah dilakukan oleh verifikator yang ditugaskan untuk memverifikasi skema LSP oleh BNSP. Selain itu, juga membahas mengenai kendala dan permasalahan yang terjadi selama proses verifikasi skema.

**Gambar 2.** Kegiatan Konsinyasi Verifikasi Skema pada akhir Desember 2021



## 6. Penyusunan Modul

Kegiatan Penyusunan Modul dilaksanakan pada tanggal 30 September–1 Oktober 2021 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun modul yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis oleh BNSP untuk proses lisensi LSP. Adapun modul yang disusun, yaitu Modul Pelatihan Asesor Lisensi Muda dan Modul Pelatihan Asesor Lisensi.



## B. Kinerja Bidang Sertifikasi

Kinerja Bidang Sertifikasi berorientasi pada penyiapan asesor atau penguji pada sertifikasi kompetensi dari berbagai sektor industri dan profesi. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup

1. perekrutan asesor kompetensi;
2. pelatihan asesor kompetensi;
3. monitoring pelaksanaan kegiatan asesmen yang dilakukan LSP;
4. evaluasi kegiatan asesmen yang dilakukan LSP; dan
5. peninjauan laporan yang dilakukan LSP.

Pada tahun 2021, kinerja bidang sertifikasi dapat terangkum dalam beberapa kegiatan berikut ini.

### 1. Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Dana BNSP

Pelatihan Asesor Kompetensi pada tahun 2021 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor SE.031/BNSP/II/2020

tentang Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) dalam Tata Normal Baru. Dengan situasi yang mulai kondusif, Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Dana BNSP dilaksanakan masing-masing untuk 10 paket calon asesor (1 paket mencakup 20 orang) dan 10 paket (1 paket mencakup 20 orang) untuk RCC Asesor Kompetensi.

Peserta Pelatihan Asesor Kompetensi Dana BNSP dan RCC Asesor Kompetensi terdiri atas

- a. personel internal BNSP;
- b. CLSP yang telah memiliki lembar verifikasi skema dari BNSP;
- c. LSP-LSP yang telah mendaftarkan diri; dan
- d. Lembaga negara, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Adapun lokasi Pelatihan Asesor Kompetensi Dana BNSP tahun 2021 dilaksanakan di enam lokasi Destinasi Superprioritas. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai bentuk kepedulian BNSP terhadap pemulihan ekonomi negara dari sektor pariwisata sehingga pemilihan lokasinya di destinasi pariwisata superprioritas yang telah dicanangkan pemerintah, yakni Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Borobudur (Jawa Tengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Danau Toba (Sumatera Utara), dan Likupang (Sulawesi Utara), serta Bali.

Waktu kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Dana BNSP tahun 2021 ini dilaksanakan selama lima bulan, yakni pada rentang bulan Maret–Juli 2021.

## **2. Magang Calon Master Asesor dan Sertifikasi Master Asesor**

Berdasarkan Petunjuk Teknis RCC Master Asesor Kompetensi dan Petunjuk Teknis Program Magang Calon Master Asesor Kompetensi maka pada tahun 2021 BNSP melaksanakan kegiatan Magang Calon Master Asesor dan Sertifikasi Master Asesor BNSP. Kegiatan Magang Calon Master Asesor dan Sertifikasi Master Asesor ini merupakan bentuk penjaminan

mutu BNSP terhadap pengembangan kompetensi bagi calon master asesor kompetensi. Dengan adanya kegiatan ini maka bobot materi uji sertifikasi kompetensi dan pelaksanaannya senantiasa dapat selalu terukur dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh BNSP.

Program Magang Calon Master Asesor tahun 2021 diikuti oleh 99 orang calon master asesor. Dari jumlah 99 orang tersebut, sejumlah 39 orang calon master asesor merupakan peserta yang telah mengikuti Pelatihan Master Asesor tahun 2019. Sementara itu, 60 orang calon master asesor lainnya adalah peserta yang telah mengikuti Pelatihan Master Asesor tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Program Magang Calon Master Asesor Kompetensi, setiap peserta Program Magang Calon Master Asesor ini harus melakukan minimal sebanyak tiga kali (3x) magang mengajar dan tiga kali (3x) magang menguji. Bagi peserta yang telah memenuhi Program Magang Calon Master Asesor dapat diusulkan untuk mengikuti Sertifikasi Master Asesor.

Kemudian untuk Program Sertifikasi Master Asesor tahun 2021 telah diikuti sebanyak 19 orang peserta calon master asesor. Berdasarkan hasil sertifikasi yang diikuti peserta dan Rapat Pleno Komite Teknis Pengambilan Keputusan Sertifikasi, dari 19 orang peserta, telah diputuskan bahwa 10 orang peserta dinyatakan kompeten. Sementara itu, 9 orang peserta lainnya dinyatakan belum kompeten.

Waktu pelaksanaan Program Magang Calon Master Asesor tahun 2021 berlangsung selama delapan bulan, yakni pada rentang bulan Maret–November 2021. Kemudian, waktu pelaksanaan Program Sertifikasi Master Asesor tahun 2021 pada hari Kamis–Jumat tanggal 28–29 Oktober 2021.

### 3. RCC Master Asesor

Kegiatan RCC Master Asesor diselenggarakan juga berdasarkan Petunjuk Teknis RCC Master Asesor Kompetensi dan Petunjuk Teknis Program Magang Calon Master Asesor Kompetensi.

Kegiatan RCC Master Asesor BNSP dilaksanakan tak lain sebagai upaya kontrol penjaminan mutu BNSP terhadap pemeliharaan kompetensi Master Asesor Kompetensi.

Kegiatan RCC Master Asesor tahun 2021 ini diawali dengan sosialisasi jadwal dan persyaratan Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi pada tanggal 12 November 2021. Sebanyak 41 orang master asesor yang telah kedaluwarsa sertifikatnya pada tahun 2020 dan 2021 diundang untuk mengikuti RCC Master Asesor ini. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memperpanjang Sertifikat Master Asesornya.

Proses selanjutnya, yaitu diberikan waktu untuk melakukan Permohonan Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi pada tanggal 13–15 November 2021 dan Verifikasi Permohonan Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi pada tanggal 14–16 November 2021.

Berdasarkan hasil Verifikasi Permohonan Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi dinyatakan sebanyak 39 orang mengikuti Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi.

Tahapan selanjutnya, yakni dilaksanakannya Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi. Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pelaksanaan Pra-Asesmen Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi pada tanggal 22 November 2021 dan Pelaksanaan Uji Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi pada tanggal 24 November 2021. Pada tahapan ini, peserta yang berhasil mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 37 peserta dan terbagi menjadi 4 tim asesmen.

Berdasarkan Rapat Pleno Komite Teknis Sertifikasi Ulang Master Asesor Kompetensi yang dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 21 Desember 2021 dan 30 Desember 2021, komite memutuskan hanya 35 peserta yang dinyatakan kompeten dan 2 orang dinyatakan untuk mengikuti Program Peningkatan (*Upgrading*) Kompetensi Master Asesor. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan jumlah master asesor. Apabila sebelumnya jumlah master asesor adalah 41 orang, pada tahun 2021 berkurang menjadi 35 orang.



#### 4. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK)

Selama program pelaksanaan sertifikasi kompetensi berlangsung sejak pertama digulirkan, kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) merupakan kegiatan yang paling mendongkrak akselerasi sertifikasi kompetensi kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Pemerintah menganggarkan sebanyak 4.500 paket PSKK dengan jumlah asesi yang diuji yaitu 90.000 asesi, dengan rincian 1 paket kegiatan diikuti oleh 20 asesi dan diuji oleh 2 orang asesor.

Berdasarkan proses pelaksanaannya, kegiatan PSKK diawali dengan proses sosialisasi secara daring, yaitu dimulai pada tanggal 15-19 Februari 2021 dan diikuti oleh 1.791 LSP. Untuk mempercepat proses sosialisasi maka sosialisasi dilakukan oleh enam tim dengan bidang industri yang berbeda.

Setelah sosialisasi dilakukan, tahapan selanjutnya, yaitu LSP melakukan pengumpulan proposal PSKK dan verifikasi proposal PSKK. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 25 Februari-19 Maret 2021.

Berdasarkan hasil verifikasi dan pleno penetapan paket PSKK, Komite Panitia Program PSKK kemudian memutuskan sebanyak 549 LSP yang berhasil mendapatkan paket PSKK. Dengan perincian asesi sesuai yang tertera dalam SK Penetapan Paket PSKK tahun 2021.

Kemudian untuk menjamin kualitas proses uji dalam kegiatan PSKK, BNSP menganggarkan sebanyak 140 paket perjalanan monitoring PSKK dengan 1 paket terdapat 2 petugas monitoring. Pelaksanaan Monitoring PSKK ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan/pelaksanaan dan tahap pelaporan.

Kegiatan PSKK tahun 2021 ini dilakukan dalam kurun waktu tujuh bulan, yaitu pada bulan Maret–September 2021. Kemudian, proses monitoring PSKK dilakukan hampir bersamaan dengan pelaksanaan PSKK, yakni dalam kurun waktu delapan bulan, tepatnya pada bulan April–Desember 2021.



### **C. Kinerja Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum**

Selama tahun 2021 Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum telah melaksanakan beragam kegiatan untuk mendukung kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai dengan

standar prosedur yang telah ditetapkan BNSP. Kondisi pandemi COVID-19 masih memengaruhi tingkat aktivitas dari Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum. Walaupun demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan, terutama harmonisasi. Berikut ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.

## 1. Kerja Sama Antarlembaga

Sebagai wujud akselerasi sertifikasi kompetensi kerja pada tahun 2021, BNSP secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi serta lembaga/kementerian terkait. Berikut ini kerja sama antarlembaga yang telah dilaksanakan selama tahun 2021.

### a. Pengesahan Skema Sertifikasi KKNi Bidang Kadastral

Kerja sama BNSP dengan Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN ini terkait dengan Skema Sertifikasi KKNi Bidang Kadastral. Seorang surveyor kadastral selayaknya harus memiliki sertifikat kompetensi khusus karena bidang ini membutuhkan keahlian dan kecakapan khusus. Secara simbolis Skema Sertifikasi KKNi Bidang Kadastral ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP, Miftakul Azis dan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Agus Wahyudi. Penandatanganan Skema Sertifikasi KKNi Bidang Kadastral dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di Gedung BNSP, Jakarta Selatan.

**Gambar 3.** Penandatanganan Skema Sertifikasi KKNi Bidang Kadastral dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di Gedung BNSP.



b. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupasi Bidang Logistik dan *Supply Chain*

Kerja sama selanjutnya terwujud antara BNSP dan empat lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemeko Perekonomian), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupasi Bidang Logistik dan *Supply Chain*.

Pengesahan Nota Kesepahaman Peta Okupasi ini diharapkan dapat menjadi standar nasional di bidang logistik dan *supply chain* serta bisa menjadikan SDM di bidang logistik semakin berkualitas, memiliki kompetensi tinggi, dan bermanfaat untuk mendorong perekonomian nasional Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Peta Okupasi Bidang Logistik dan *Supply Chain* dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021 di Ruang Rapat Loka Kretagama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

**Gambar 4.** Pengesahan Nota Kesepahaman pada tanggal 9 Maret 2021 di Ruang Rapat Loka Kretagama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.



c. Penandatanganan Nota Kesepahaman Sertifikasi di Bidang Penanggulangan Bencana

BNSP dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menandatangani nota kesepahaman bersama tentang Kerja Sama Sertifikasi Profesi di Bidang Penanggulangan Bencana. Tujuan dari kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional di bidang penanggulangan bencana. Penandatanganan kesepahaman dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 tanpa seremonial khusus mengingat situasi pandemi dan berlakunya PPKM.

d. Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Talenta Digital dan Digital Hub

Kerja sama BNSP bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), terkait Program Talenta Digital dan Digital Hub.

Tujuan dari Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Talenta Digital dan Digital Hub, yaitu

- 1) meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui program talenta digital dan digital hub; dan
- 2) meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan program pemerintah yang terkait peningkatan kuantitas dan kualitas talenta digital dan digital hub.

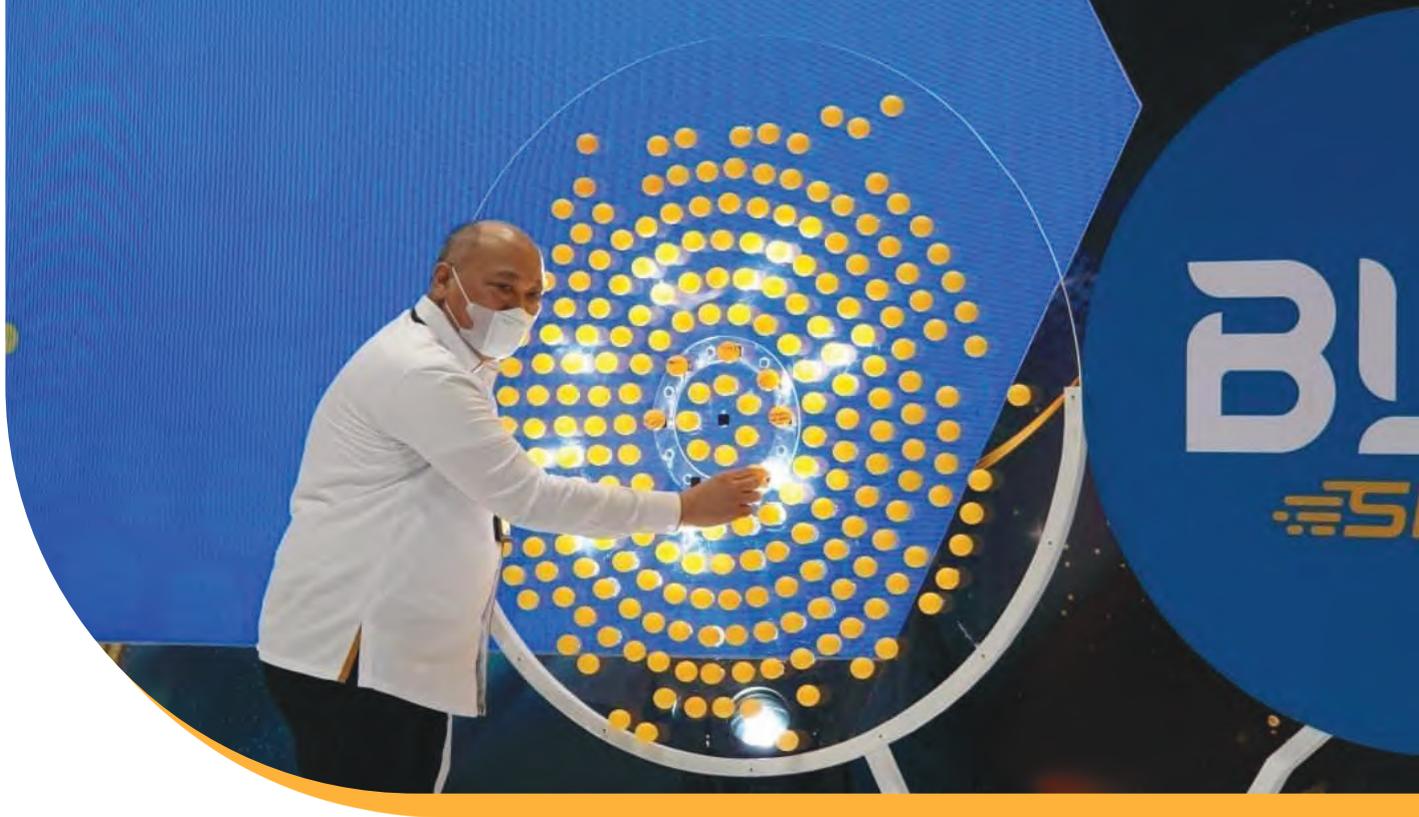
Penandatanganan nota kesepahaman bersama dilaksanakan tanggal 16–18 November 2021 di Senayan, Jakarta Pusat. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dihadiri, antara lain oleh Ketua BNSP, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Menteri Dikbudristek), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menteri Kominfo) dan Menteri Perdagangan yang seremonialnya dilakukan bertepatan dengan Pembukaan BLU (Badan Layanan Umum) Expo pada tanggal 16 November 2021 di Jakarta dan disaksikan oleh Presiden Joko

Widodo secara virtual. Kerja sama strategis ini dilakukan dilakukan upaya akselerasi pembangunan dan pengembangan ekosistem melalui integrasi sistem informasi dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintah.

Pembuatan MoU tersebut dilakukan setelah dipertimbangkannya beberapa hal oleh para pihak terkait. Dalam hal ini, Kemdikbudristek merupakan pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi sedangkan Kominfo berada bidang Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Kemnaker berada di bidang Ketenagakerjaan dan Kemendag berada di bidang Perdagangan. Adapun BNSP sendiri merupakan lembaga independen yang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.



## **MOU** PROGRAM TALENTA DIGITAL DAN DIGITAL HUB



**Gambar 5.** Penandatanganan Nota Kesepahaman Talenta Digital dan Digital Hub 16–18 November 2021 di Senayan.

## 2. Diseminasi Peraturan BNSP

Kegiatan Diseminasi Peraturan BNSP perlu dilakukan secara berkala mengingat dinamika yang terjadi dalam sistem sertifikasi nasional. Hal ini didasarkan pada Petunjuk Teknis RCC Master Asesor Kompetensi dan Petunjuk Teknis Program Magang Calon Master Asesor Kompetensi. Untuk itu, pada 23 September 2021, BNSP menyelenggarakan Diseminasi Peraturan BNSP di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi master asesor kompetensi dan calon master asesor kompetensi.

**DISEMINASI  
PERATURAN BNSP**

Ja... 2021

Tujuan dari kegiatan Diseminasi Peraturan BNSP, yaitu

- 1) menyebarluaskan informasi Petunjuk Teknis RCC Master Asesor Kompetensi dan Petunjuk Teknis Magang Calon Master Asesor Kompetensi.
- 2) meningkatkan pemahaman master asesor kompetensi dan calon master asesor kompetensi terkait petunjuk teknis tersebut.
- 3) memberikan ruang diskusi dan silaturahmi antara BNSP dan master asesor kompetensi serta calon master asesor kompetensi.

Kegiatan Diseminasi Peraturan BNSP dilaksanakan di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan tanggal 23 September 2021.

**Gambar 6.** Diseminasi Peraturan BNSP dilaksanakan di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan tanggal 23 September 2021.



### 3. Harmonisasi Sertifikasi dengan Lembaga/ Kementerian

BNSP senantiasa merespons setiap perkembangan dinamis di dunia kerja dan industri. Demi terciptanya SDM Indonesia yang unggul, BNSP selalu terbuka untuk melakukan harmonisasi terhadap kebutuhan dan peraturan yang telah ada. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan BNSP dapat selaras dengan kebijakan dan kebutuhan industri terkait.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan harmonisasi yang dilakukan oleh BNSP dengan berbagai lembaga di berbagai sektor.

#### a. Rapat Teknis Harmonisasi Sertifikasi Bidang K3

Rapat Teknis Harmonisasi Sertifikasi K3 dilaksanakan antara BNSP dan Kementerian Ketenagakerjaan diwakili oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) serta Direktorat Stankomlatker. Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Berkaitan dengan harmonisasi Sertifikat Bidang K3 ini ada beberapa poin yang menjadi kebijakan bersama dan senantiasa harus diimplementasikan, yaitu

- 1) mengidentifikasi regulasi yang ada dari setiap bagian, yaitu BNSP, Ditjen. Binwasnaker dan K3, serta Dit. Stankomlatker;
- 2) membentuk Tim Teknis Harmonisasi K3 yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga) orang dari Dit. Stankomlatker, Dit. Bina K3, dan Dit. Pengawasan Norma K3 dengan Anggota BNSP Bidang Lisensi sebagai Dewan Pengarahnya;
- 3) Tim Teknis Harmonisasi K3 sudah terbentuk dan sudah dibuatkan SK oleh Ketua BNSP.

b. Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga



**Gambar 7.** Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga (dalam rangka FGD Penyusunan Toolbox ASEAN) dilaksanakan di Sotis Hotel Kemang, Jakarta Selatan tanggal 25 dan 26 November 2021

Dalam Rangka  
Laporan Validasi Instrumen Asesmen  
Toolbox ASEAN

Jakarta, 21 Desember 2021



**Gambar 8.** Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga (dalam rangka Laporan Validasi Instrumen Asesmen Toolbox ASEAN) dilaksanakan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan tanggal 21 Desember 2021.

Dalam rangka penyelarasan sistem sertifikasi kompetensi dengan kementerian atau lembaga teknis yang membidangi berbagai sektor profesi di Indonesia maka dilakukan kegiatan Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga (dalam rangka FGD Penyusunan Toolbox

ASEAN dan Laporan Validasi Instrumen Asesmen Toolbox ASEAN).

Tujuan Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga, yakni sebagai berikut.

- 1) Memastikan bahwa Indonesia mampu menerapkan standar ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP), asesmen serta sertifikasi ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) sesuai prinsip ASEAN Guiding Principle (AGP).
- 2) Menyusun dan memvalidasi instrumen asesmen untuk skema ASEAN bidang pariwisata.
- 3) Mengidentifikasi pelaksanaan sertifikasi, seperti faktor peluang, hambatan, dan tantangan di sektor K3.
- 4) Mendorong *review* Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang K3.

Kesimpulan kegiatan harmonisasi adalah berikut ini.

- 1) Rencana asesmen yang sesuai potensi kandidat dikembangkan menggunakan Formulir PAAP 1/PAAP 2 sesuai penugasan.
- 2) Instrumen asesmen/MUK menggunakan Toolbox ASEAN secara konsisten tanpa perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- 3) Unit kompetensi untuk validasi menggunakan unit kompetensi *Participate in Assessment Validation* sesuai persyaratan ACCSTP.
- 4) BNSP akan meminta LSP mendata kebutuhan ASEAN *National Assessor* untuk pengajuan pelatihan ASEAN *National Assessor* kepada Kemenparekraf.
- 5) Pengintegrasian skema ASEAN menggunakan formulir PAAP 1 dan PAAP 2 Matrix Asesmen.
- 6) Materi Uji Kompetensi (MUK) terdiri dari portofolio (untuk memastikan bukti tidak langsung) dan observasi (untuk memastikan bukti langsung). MUK untuk asesi yang belum berpengalaman, yaitu klarifikasi pihak ketiga.

- 7) Pada Januari 2022, mulai melayani LSP untuk menyusun Toolbox ASEAN.
- 8) Politeknik atau SMK yang menggunakan skema ASEAN harus menyesuaikan kurikulum dengan Toolbox ASEAN.

Kegiatan Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga (dalam rangka FGD Penyusunan Toolbox ASEAN) dilaksanakan di Sotis Hotel Kemang, Jakarta Selatan tanggal 25 dan 26 November 2021 dan kegiatan Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga (dalam rangka Laporan Validasi Instrumen Asesmen Toolbox ASEAN) dilaksanakan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan tanggal 21 Desember 2021.

- c. Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Antara BNSP dengan Dewan Pers



**Gambar 9.** Harmonisasi Sertifikasi antara BNSP dengan Dewan Pers dalam rangka mengembangkan harmonisasi Sistem Kompetensi Kerja Nasional bidang pers yang diselenggarakan di Ruang Rapat BNSP, Jakarta Selatan pada 26 April 2021.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjalin kerja sama dengan Dewan Pers dalam rangka mengembangkan harmonisasi Sistem Kompetensi Kerja Nasional. Agenda audiensi yang diselenggarakan di Ruang Rapat BNSP, pada Senin, 26 April 2021 itu, dihadiri oleh pimpinan kedua lembaga, yakni Ketua BNSP (Kunjung Masehat) beserta anggota BNSP dan Ketua Dewan Pers (Muhammad Nuh) beserta jajarannya.

Kerja sama itu didasari oleh kewajiban BNSP yang tertera dalam PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, yakni BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Sementara itu, pada UU Nomor 13 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa BNSP diberikan amanah untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam rangka memastikan kompetensi kerja seseorang dari aspek pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman kerja.

Kerja sama antara BNSP dengan Dewan Pers bertujuan membangun sistem sertifikasi bagi para pekerja di bidang pers. Wakil Ketua BNSP, Miftakul Azis menyampaikan bahwa BNSP akan memberikan lisensi kepada LSP-LSP yang bergerak di bidang media jika telah mendapatkan rekomendasi Dewan Pers dan Kominfo. Miftakul Azis memberi penegasan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pers menjadi wewenang Dewan Pers sepenuhnya. BNSP dan Dewan Pers akan terus berkoordinasi dalam membangun sistem sertifikasi bagi insan pers.

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Dewan Pers memiliki tugas untuk membina dan mengawasi insan pers agar kemerdekaan pers senantiasa tercapai. Oleh sebab itu, BNSP dalam menerbitkan Sertifikasi Profesi Nasional senantiasa bekerja sama dengan Dewan Pers agar tercipta Sistem Sertifikasi Kerja Nasional Bidang Pers yang bebas dari segala macam kepentingan dan mengutamakan asas kemerdekaan pers.

Senada dengan Aziz, Ketua Dewan Pers, yakni Muhammad Nuh menyebut bahwa ilmu itu akan terus berkembang sehingga Sertifikasi Kompetensi di bidang pers tidak akan berhenti. Pelatihan secara berkelanjutan menjadi sarana penting bagi para insan pers agar kompetensi mereka terus terasah dan tidak kedaluwarsa. Oleh sebab itu, keterbaruan materi atau ilmu di bidang pers menjadi komponen yang dapat dikembangkan oleh Dewan Pers bersama dengan BNSP dalam membangun Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di bidang pers.

Dalam membangun sistem sertifikasi ini, Dewan Pers telah memulainya dengan memiliki 18 penguji aktif yang siap menguji dalam Uji Kompetensi Wartawan. Terakhir, Wakil Ketua BNSP, Miftakul Azis menyampaikan bahwa penguji dapat disertifikasi sebagai Asesor Kompetensi sehingga kredibilitas penguji dapat lebih terjamin.

d. BNSP Jalin Kerja Sama Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan LPJK



**Gambar 10.** Harmonisasi Sertifikasi BNSP dengan LPJK dalam rangka mengembangkan harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi, diselenggarakan di Ruang Rapat BNSP, Jakarta Selatan pada 27 Oktober 2021.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk mengembangkan harmonisasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terciptanya pekerja konstruksi berkompentensi tinggi. Agenda kerja sama ini diselenggarakan dalam acara Penandatanganan Berita Acara Format Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi, pada Rabu, 27 Oktober 2021 di Ruang Rapat BNSP. Adapun yang memimpin penandatanganan itu adalah Ketua BNSP (Kunjung Masehat) dan Ketua LPJK (Taufik Widjoyono).

LPJK sebagai lembaga non-struktural di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Sang Ketua, Taufik Widjoyono menyampaikan bahwa upaya membangun dan mengembangkan harmonisasi Sertifikasi Kompetensi di bidang konstruksi sangat dibutuhkan. Ia menilai masih sangat kurang tenaga kerja di bidang konstruksi yang tesertifikasi, jumlahnya kurang dari 10 persen. Oleh sebab itu, dengan menggandeng BNSP, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kerja pekerja konstruksi.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2018, BNSP sebagai lembaga independen memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang kemudian menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja kepada masyarakat. Oleh sebab itu, harmonisasi antara BNSP dan LPJK dalam membangun Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang konstruksi dapat terealisasi.

Ketua BNSP, Kunjung Masehat menyampaikan bahwa melalui UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) segala proses Sertifikasi Kompetensi di bidang konstruksi harus dipercepat, sebab kebutuhan pekerja tesertifikasi di bidang konstruksi sangat dibutuhkan. Dalam menyambut UU Cipta Kerja, BNSP telah bergerak bersama dengan Kementerian PUPR dengan menjadi Tim Penyelenggara Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Keterampilan di bidang konstruksi. Dalam hal ini, BNSP mengapresiasi Kementerian PUPR dan LPJK yang sigap dalam proses harmonisasi sertifikasi ini.

Perkembangan kerja sama BNSP dan LPJK saat ini telah berjalan, yakni keduanya tengah mempersiapkan Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja di bidang konstruksi. Adapun aktivitasnya, di antaranya menyelenggarakan Uji Kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi, *Witness Uji Kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi*, dan menyetujui format Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang konstruksi. Ketua LPJK, Taufik Widjoyono menyebutkan bahwa sertifikat yang tengah digarap LPJK bersama BNSP merupakan sertifikat pertama di dunia yang diproduksi oleh LSP melalui format tersebut. Ia memberikan apresiasi kepada BNSP yang telah memfasilitasi seluruh proses harmonisasi sertifikasi ini dan berharap kolaborasi ini terus berlanjut.

Dengan demikian, kerja sama antara BNSP dan LPJK ini menjadi terobosan penting di bidang Sertifikasi Profesi, khususnya di sektor strategis, seperti bidang konstruksi. Kerja sama ini dapat menjadi pembelajaran bagi BNSP untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pada sektor-sektor yang lain.

#### 4. Penyebaran Surat Edaran

Seiring dengan kondisi yang membaik pada tahun 2021, sebagai upaya melakukan implementasi dari kerja sama yang telah dijalin oleh berbagai pihak, BNSP mengeluarkan Surat Edaran sebagai dasar hukum untuk melakukan implementasi program kerjanya, Surat Edaran tersebut adalah berikut ini.

- a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 001/BNSP/V/2021 tentang Penjaminan Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pelayanan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam Masa Pandemi Covid-19.
- b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 002/BNSP/VII/2021 tentang Penerapan Toolbox ASEAN dalam Asesmen Skema Sertifikasi *Asean Common Competency Standards For Tourism Professionals (ACCSTP)*.

- c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 003/BNSP/VIII/2021 tentang Penyesuaian SOP Sistem Manajemen Mutu LSP.
- d. Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 1331/BNSP/IX/2021 tentang Permohonan Blangko Sertifikat.
- e. Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 1722/BNSP/XI/2021 tentang Surveilans Pemegang Sertifikat Kompetensi.
- f. Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 007/BNSP/XII/2021 tentang Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.

## 5. Penerapan ASEAN Guiding Principles (AGP)

Sebagai upaya menyelaraskan standar kompetensi SDM Indonesia di tingkat ASEAN maka BNSP sebagai lembaga penggerak yang diamanahi untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi, perlu melakukan sosialisasi penerapan ASEAN Guiding Principles (AGP) dan perlu untuk menyiapkan master asesor dan calon master asesor untuk tingkat ASEAN. BNSP saat ini juga terus melakukan penguatan sistem dan manajemen kelembagaan agar pada saat AGP diimplementasikan dapat dipastikan berjalan baik dan lancar. Saat ini kajian terhadap AGP sudah memasuki fase kedua.

**Gambar 11.** Penerapan Asean Guiding Principles dilaksanakan di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta tanggal 10 Juni 2021



Dari hasil kajian dan rapat yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi ASEAN *Guiding Principles*-2 dan Persiapan Pelaksanaan ASEAN *Guiding Principles*-3 adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukannya tindakan perbaikan atas Materi Uji Kompetensi
- b. Perlu dilakukannya tindakan perbaikan atas Asesor Kompetensi.
- c. Tindakan perbaikan atas Keterbukaan Data.
- d. Tindakan perbaikan atas LSP.
- e. Persiapan AGP-3 Plus
- f. Persiapan AGP-ASCEND.

## 6. Kerja Sama Bilateral/Multilateral

BNSP telah ikut berpartisipasi dalam perundingan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan negara-negara lain berikut ini.

- a. Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA)

Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan pekan pertama putaran ke-11 Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) pada Jumat, 12 November 2021. Perundingan pekan pertama putaran ke-11 ini berhasil memperoleh kemajuan dengan membahas 14 isu perdagangan dan investasi. Seluruh rangkaian putaran ke-11 perundingan IEU–CEPA sendiri berlangsung secara hibrida pada 8–19 November 2021. Kedua belah pihak sepakat menjajaki pertemuan intersesi sebelum tahun 2021 berakhir.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua Kelompok Perunding Indonesia, Iman Pambagyo, sedangkan Ketua Perunding EU adalah Directorate General for Trade, European Commission, Filip Deraedt.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, kedua pihak tetap berupaya untuk mencapai kemajuan dalam perundingan,

terutama untuk isu-isu yang bersifat teknis dan hampir mencapai kesepakatan. Pada putaran ini, kedua pihak berhasil menyepakati secara teknis isu sanitasi dan fitosanitasi.

Secara umum, kedua pihak juga mencapai kemajuan dalam pembahasan teks berbagai isu yang dibahas. Terdapat 14 isu yang dirundingkan pada perundingan putaran kali ini, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kompetisi, ketentuan asal barang, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi, instrumen pengamanan perdagangan, perdagangan dan pengembangan berkelanjutan, usaha kecil menengah, kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas, pengadaan pemerintah, penyelesaian sengketa, serta transparansi dan *good regulatory practice*.

Perundingan putaran ke-11 ini merupakan kelanjutan perundingan putaran ke-10 yang diselenggarakan secara virtual pada 22 Februari–5 Maret 2021. Perundingan Putaran ke-11 seharusnya diselenggarakan pada bulan Juli 2021, tetapi tertunda karena lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Perundingan IEU-CEPA telah diluncurkan pada 18 Juli 2016 dan merupakan perundingan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitranya. Implementasi IEU-CEPA yang didukung dengan UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan akses pasar barang, jasa, investasi, serta meningkatkan perekonomian Indonesia yang berdaya saing.

b. **Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA)**

IK-CEPA merupakan suatu bentuk komitmen pemimpin kedua negara yang sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi “special strategic partnership”. Dengan IK-CEPA, kedua negara sepakat untuk mendorong hubungannya ke tataran yang lebih tinggi dalam aspek

industri, infrastruktur, ketenagakerjaan dan tentunya ekonomi dan perdagangan.

Melalui IK-CEPA, Indonesia dan Korea Selatan masing-masing memberikan penambahan komitmen pembukaan pasar barang yang lebih baik dari yang ditawarkan dalam ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). Komitmen Korea Selatan tersebut menandai adanya akses yang lebih luas dan istimewa ke pasar Korea Selatan, baik bagi perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah (UKM). Pada investasi, kedua negara berkomitmen membuka peluang peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Indonesia juga memberikan fasilitas berupa preferensi tambahan untuk 104 pos tarif bahan baku yang diperlukan Korea Selatan untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam IK-CEPA, kedua pihak juga berkomitmen melakukan kerja sama ekonomi di berbagai bidang, antara lain industri; pertanian, perikanan, kehutanan; aturan dan prosedur perdagangan; infrastruktur; teknologi dan inovasi; budaya dan bidang kreatif; serta UKM. Melalui kerja sama ekonomi di IK-CEPA, Indonesia dapat meminta pendampingan teknis (*technical assistance*), *sharing best practices*, maupun pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pentingnya sosialisasi yang dilaksanakan agar para pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha dapat memahami dan memanfaatkan peluang IK-CEPA yang diharapkan dapat diimplementasikan segera. Total perdagangan Indonesia-Korea Selatan pada periode Januari—September 2021 tercatat sebesar 13,25 miliar USD atau meningkat 37,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar 6,44 miliar USD. Sedangkan, impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar 6,81 miliar USD.

c. Perundingan Putaran Kedua Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement/IUAE-CEPA)

Perundingan berlangsung secara hibrida pada 28—30 Oktober 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Kemendag, Ni Made Ayu Marthini. Sementara Delegasi UAA dipimpin Assistant Undersecretary International Trade Affairs Sector Ministry of Economy of UAE, Juma Al Kait.

Seluruh cakupan isu perundingan dibahas dalam Putaran Kedua ini, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, investasi, ekonomi Islam, kerja sama ekonomi termasuk usaha kecil dan menengah, hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta hukum dan isu kelembagaan. Walaupun perundingan IUAE-CEPA baru diluncurkan kedua Menteri Perdagangan awal September lalu, pada putaran ini perundingan telah mencapai kemajuan yang baik. Terutama, untuk isu kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi dan usaha kecil dan menengah, ekonomi Islam, serta niaga elektronik.

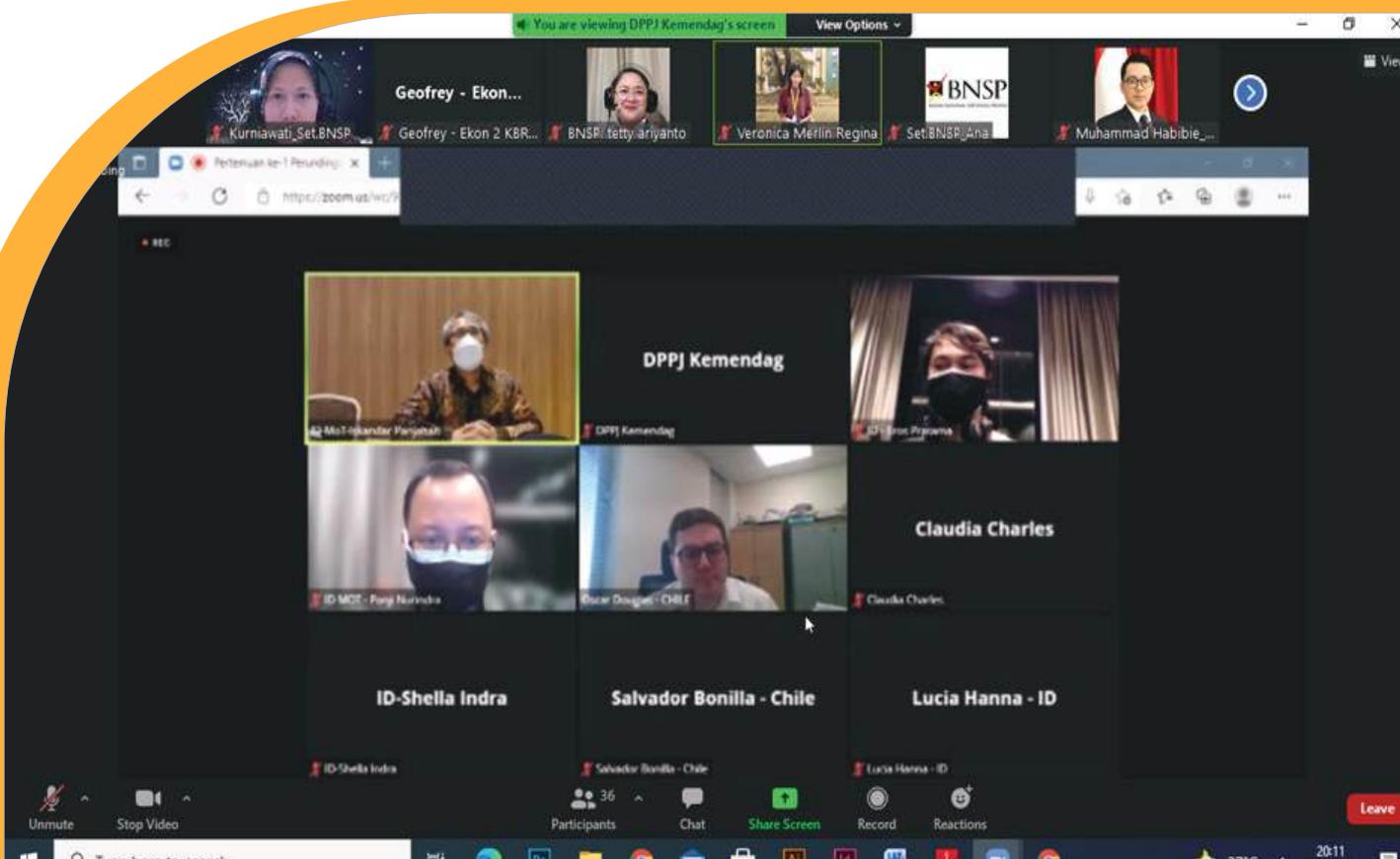
Kedua delegasi memahami arti penting IUAE-CEPA, yang diharapkan dapat mendorong kemitraan antara kedua negara yang lebih luas, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, terutama pasca-COVID-19. Untuk lebih mendorong kemajuan perundingan dan mencapai target penyelesaian yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan masing-masing, kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan pertemuan intersesi sebelum pelaksanaan Putaran ke-3 yang menurut rencana diadakan pada Januari 2022.

Total perdagangan Indonesia–UAE pada 2020 tercatat sebesar 2,93 miliar USD. Nilai ekspor Indonesia ke UAE sebesar 1,24 miliar USD dan impor Indonesia dari UAE sebesar 1,68 miliar USD. Sementara pada periode Januari–

Agustus 2021, total perdagangan kedua negara tercatat 2,42 miliar USD, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar 1,12 miliar USD dan impor sebesar 1,29 miliar USD. Komoditas ekspor utama Indonesia ke UAE, antara lain minyak sawit, perhiasan, tabung dan pipa besi, mobil dan kendaraan bermotor, serta kain tenun sintetis. Sementara itu, komoditas impor utama Indonesia dari UEA, di antaranya produk setengah jadi besi atau baja, hidrokarbon acyclis, aluminium tidak ditempa, logam mulia koloid, dan polimer propilena.

d. Pertemuan Bilateral Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile (IC-CEPA)

IC-CEPA merupakan satu satunya CEPA yang dimiliki Indonesia dengan negara di benua Amerika. Untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, Indonesia terus melakukan sosialisasi secara berkala dan mendorong para pelaku usaha Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan IC CEPA. Upaya ini juga dilakukan Chile. IC-Cepa telah diimplementasikan sejak 10 Agustus 2019. Pada 2020, Indonesia mengeksport sejumlah komoditas dengan menggunakan SKA IC CEPA. Pada 2020, 80 persen dari total 144 juta USD ekspor Indonesia ke Chile



memanfaatkan skema preferensi IC-CEPA, antara lain untuk alas kaki, barang rajutan, barang dari kulit, pakaian jadi bukan rajutan, serta perabotan dan penerangan rumah.

Indonesia dan Chile sepakat melakukan perundingan perdagangan jasa dalam kurun waktu satu tahun. Tim negosiasi saat ini sedang dalam proses perundingan untuk mengejar target penyelesaian yang sudah disepakati kedua pihak. Kami berharap agar perundingan perdagangan jasa dapat dimulai pada pertengahan 2021 seperti yang telah ditargetkan. Dengan demikian, akan lebih banyak potensi yang dapat dipetik kedua pihak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kemendag, total perdagangan Indonesia dan Chile pada 2020 tercatat sebesar 253,6 juta USD. Ekspor Indonesia ke Chile sebesar 144,7 juta USD dan impor Indonesia dari Chile sebesar 108,9 juta USD. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia surplus 35,8 juta USD dari Chile.

e. Partisipasi pada APEC 68<sup>th</sup> Group on Services Meeting

APEC 68th Group on Services (GOS) Meeting dilaksanakan secara virtual meeting pada tanggal 10-11 Agustus 2021. Sebagai forum layanan unggulan dalam APEC, Group on Services telah mengambil langkah atau kebijakan berikut ini.

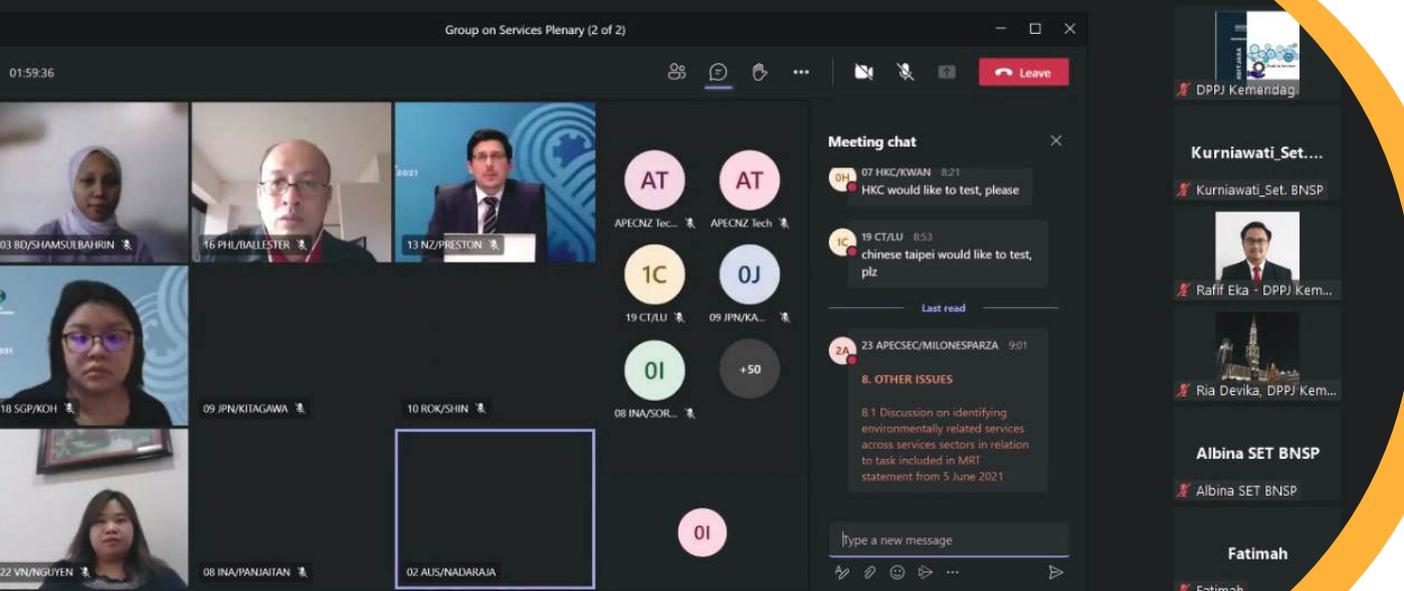
- 1) Mempromosikan regulasi layanan domestik sebagai isu prioritas untuk meningkatkan perdagangan jasa global, sebagaimana tecermin dalam adopsi APEC Non-binding Principles on Domestic Regulations pada 2018 dari APEC Non-binding Principles on Domestic Regulation.
- 2) Mengidentifikasi regulasi domestik sebagai salah satu isu utama dalam dorongan terakhir pada layanan untuk menyelesaikan Bogor Goals, sebagaimana tecermin dalam Laporan Akhir 2020 kepada Menteri Komite Perdagangan dan Investasi APEC.
- 3) mengakui peran positif yang dimainkan oleh Inisiatif Pernyataan Bersama Peraturan Domestik Layanan

WTO dalam memajukan hasil seperti yang disorot dalam Pernyataan Bersama 2021 Menteri APEC yang Bertanggung Jawab untuk Perdagangan.

- 4) Mengakui kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pemasok sektor jasa, khususnya dari negara berkembang, dalam memenuhi persyaratan dan prosedur perizinan dan kualifikasi, serta standar teknis.
- 5) Mengakui hak ekonomi APEC untuk mengatur dan memperkenalkan peraturan baru tentang penyediaan layanan untuk memenuhi tujuan kebijakan.
- 6) Memperhatikan meningkatnya hambatan perdagangan jasa yang timbul dari pandemi COVID-19 dan peran penting yang dapat dimainkan oleh perdagangan jasa yang ditingkatkan dalam pemulihan ekonomi.
- 7) Mengingat studi dan *workshop* yang didukung oleh Grup APEC tentang regulasi domestik yang mencatat kinerja baik ekonomi APEC dalam pengukuran regulasi domestik, disiplin terobosan regulasi domestik dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA), dan perjanjian perdagangan regional (RTA) di kawasan APEC, serta keuntungan ekonomi signifikan dapat diperoleh melalui adopsi yang lebih luas dari praktik regulasi domestik yang lebih baik.
- 8) Mengakui tingginya tingkat partisipasi ekonomi APEC saat ini dalam Inisiatif Pernyataan Bersama Peraturan Domestik Layanan WTO dan posisi masing-masing ekonomi APEC dalam Inisiatif Pernyataan Bersama Peraturan Domestik Layanan WTO.
- 9) APEC Group on Services mengucapkan selamat kepada peserta WTO Services Domestic Regulation Joint Statement Initiative atas kemajuan yang dicapai hingga saat ini. Hal ini mendorong mereka melipatgandakan upaya untuk menyelesaikan negosiasi dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO, dan mendorong semua anggota WTO yang tersisa untuk mempertimbangkan bergabung dengan inisiatif, dan memberikan dukungan apa pun untuk menyelesaikan tujuan itu.



Recording



f. Partisipasi pada SLOM-WG ke-14

Pertemuan SLOM-WG ke-14 dilaksanakan secara virtual pada tanggal 10 November 2021. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand

dan Vietnam. Perwakilan Sekretariat ASEAN juga hadir. Pertemuan ini diselenggarakan oleh negara Vietnam dan diketuai oleh Indonesia sebagai Ketua SLOM-WG pada tahun 2020-2022.

Dr. Ha Thi Minh Duc, Deputi Direktur Jenderal, Departemen Kerja Sama Internasional, Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Urusan Sosial Vietnam, menyampaikan sambutan. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Negara Anggota ASEAN (AMS) dan Sekretariat ASEAN untuk bergabung dalam Pertemuan dan mengharapkan diskusi yang bermanfaat selama pertemuan. Ia mengungkapkan optimismenya bahwa penyelenggaraan 14th SLOM-WG akan semakin mendukung kerja sama ketenagakerjaan di kawasan ASEAN.

Muhammad Arif Hidayat, Kepala Biro Kerjasama Internasional Kementerian Tenaga Kerja RI dan Ketua Pertemuan SLOM-WG ke-14 menyampaikan kata sambutannya. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada Vietnam atas penyelenggaraan pertemuan yang sangat baik dan kepada Sekretariat ASEAN atas dukungan yang diberikan kepada AMS. Lebih lanjut, ia menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada semua AMS atas dukungan yang diberikan dalam pengesahan Deklarasi ASEAN tentang Mempromosikan Daya Saing, Ketahanan dan Kelincahan untuk Masa Depan Kerja oleh Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-26 dan diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada Pertemuan ke-38 dan KTT ASEAN ke-39. Ia meminta dukungan AMS dalam tindak lanjut deklarasi. Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa proyek dan kegiatan di bawah Rencana Kerja SLOM-WG 2021-2025 akan lebih berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia di kawasan ASEAN dan pada akhirnya akan menghasilkan tenaga kerja yang kuat dan lebih efektif. Ia mengharapkan komitmen konkret dan penguatan kerja sama yang akan dicapai melalui pembahasan dalam pertemuan SLOM-WG ke-14.



**Gambar 12.** SLOM-WG ke-14 dilaksanakan di Hotel Grand Melia, Jakarta tanggal 10 November 2021 dilaksanakan secara *virtual meeting*.

g. Partisipasi pada Annual Meeting of the APO Accreditation Body Council (APO)

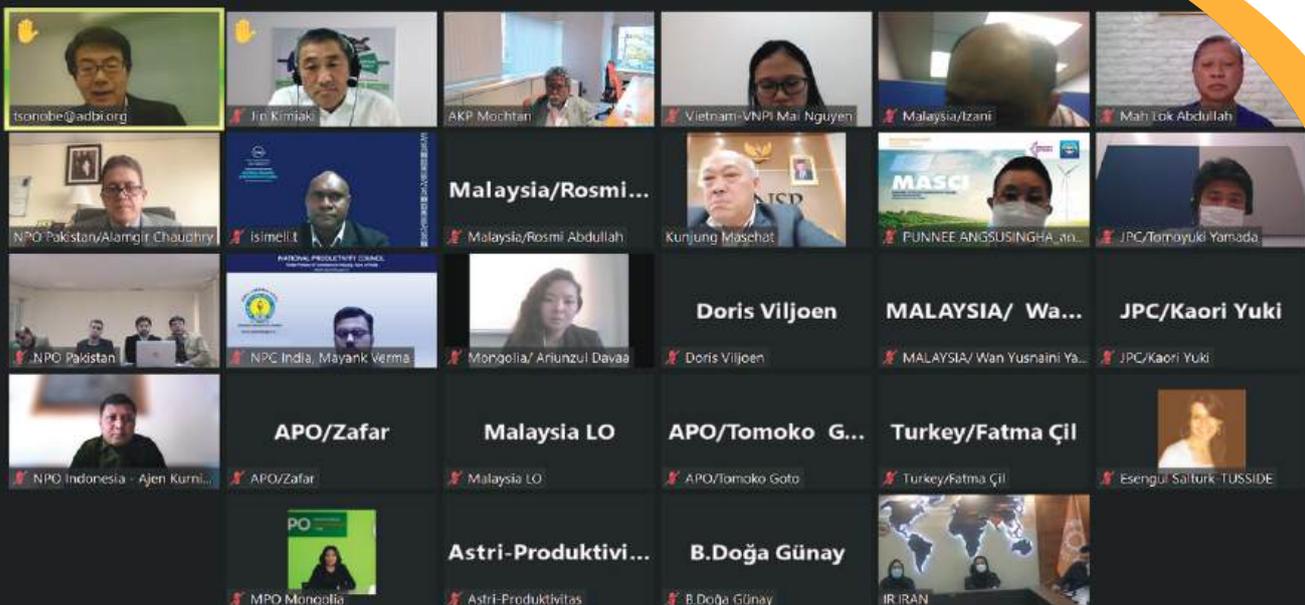
Annual Meeting of the APO Accreditation Body Council (APO) dilaksanakan secara *virtual meeting* pada tanggal 15 Desember 2021. Program Akreditasi dan Sertifikasi APO adalah inisiatif strategis untuk meningkatkan peran Organisasi Produktivitas Nasional (NPO) dan afiliasinya di negara-negara anggota. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan ganda, yakni mengembangkan mereka sebagai badan sertifikasi terakreditasi APO (LS) demi mengoperasikan skema sertifikasi untuk spesialis produktivitas dan memperkuat kerja sama antar-NPO agar dapat meningkatkan produktivitas. Program ini membangun kemampuan organisasi dan mempersiapkan mereka untuk menghasilkan pekerja profesional yang memiliki kecakapan dan produktivitas, serta memiliki reputasi yang baik. Selain itu, secara aspek kualifikasi kredensialnya mampu memenuhi standar internasional. Tujuan dari inisiatif ini adalah memperluas peran NPO dan organisasi afiliasinya dalam memenuhi persyaratan masa depan untuk spesialis produktivitas di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk sertifikasi dan sertifikasi ulang LS dalam menjalankan skema sertifikasi orang, Badan Akreditasi APO (APO-AB) memastikan kepatuhan terhadap standar dengan memeriksa kompetensi, memverifikasi cakupan terakreditasi, dan memantau efektivitas sistem manajemen mutu NPO. NPO yang memenuhi syarat sebagai CB APO harus mematuhi APO-AB 1003:2020 Persyaratan Umum untuk Lembaga Sertifikasi: Skema Sertifikasi Orang.

*Workshop* ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang keseluruhan sistem akreditasi APO, persyaratan pengembangan CB di bawah APO-AB, dokumentasi yang diperlukan, proses audit internal, teknik untuk melakukan penilaian kesesuaian, dan cara mengoperasikan skema sertifikasi spesialis produktivitas sebagai APO- CB terakreditasi.

Kisah sukses dibagikan oleh dua lembaga/instansi terakreditasi APO CBs pertama, yakni Badan Sertifikasi Perusahaan Produktivitas Malaysia dan Badan Sertifikasi Spesialis Produktivitas Vietnam. Saat ini, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Mongolia, Pakistan, dan Turki sedang dalam berbagai tahap proyek pengembangan CB. Banyak NPO lain juga menunjukkan kesediaan untuk melakukan proyek pengembangan CB pada tahun 2022.



Gambar 13. APO dilakukan secara *virtual meeting* pada tanggal 15 Desember 2021



## D. Kinerja Bidang Data dan Informasi

### 1. Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP

Pada tahun 2021 dilakukan empat paket Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP di dua lokasi, yaitu Garut dan Bekasi. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan cara penggunaan sistem informasi BNSP kepada LSP.

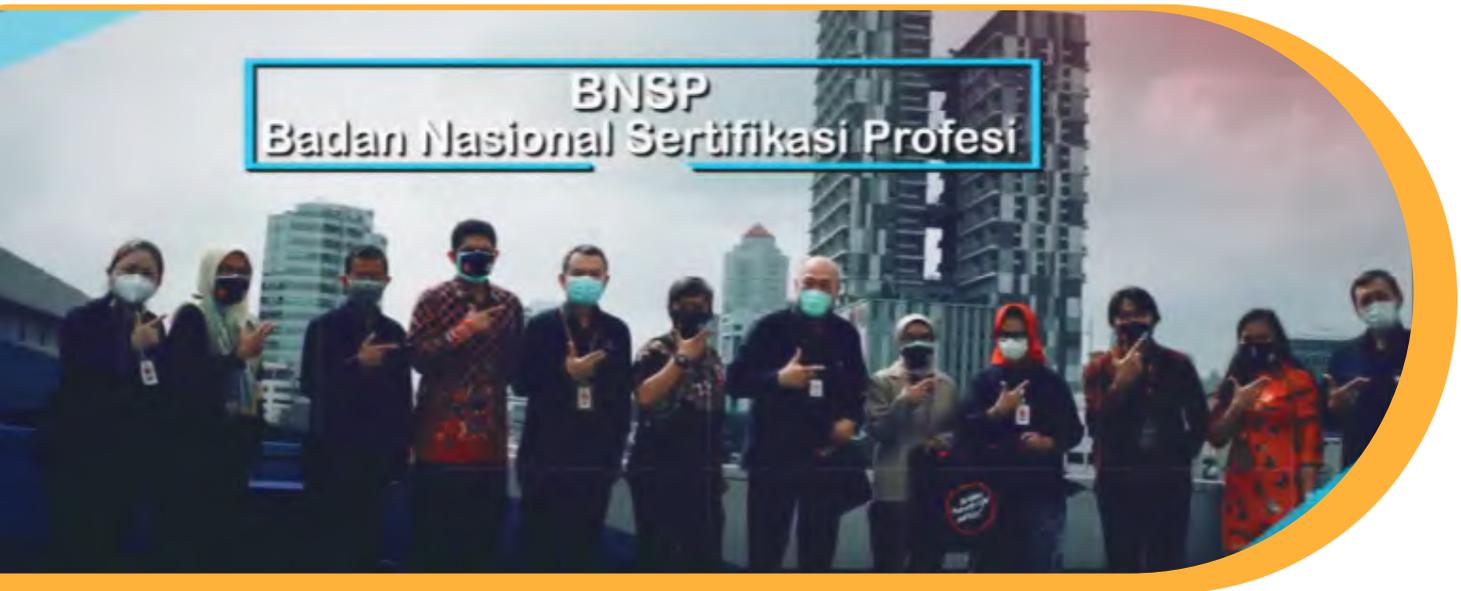


Tabel 4. Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP

LOKASI	JUMLAH PAKET	TOTAL PESERTA
Garut	2 paket x 50 orang	100 orang
Bekasi	2 paket x 50 orang	100 orang

## 2. Promosi

Untuk lebih mengukuhkan citra dan reputasi BNSP di masyarakat maka Bidang Datin melaksanakan program kerja satu paket pembuatan video profil BNSP. Hasil video digunakan dalam berbagai kegiatan BNSP sebagai pengenalan kepada peserta kegiatan.

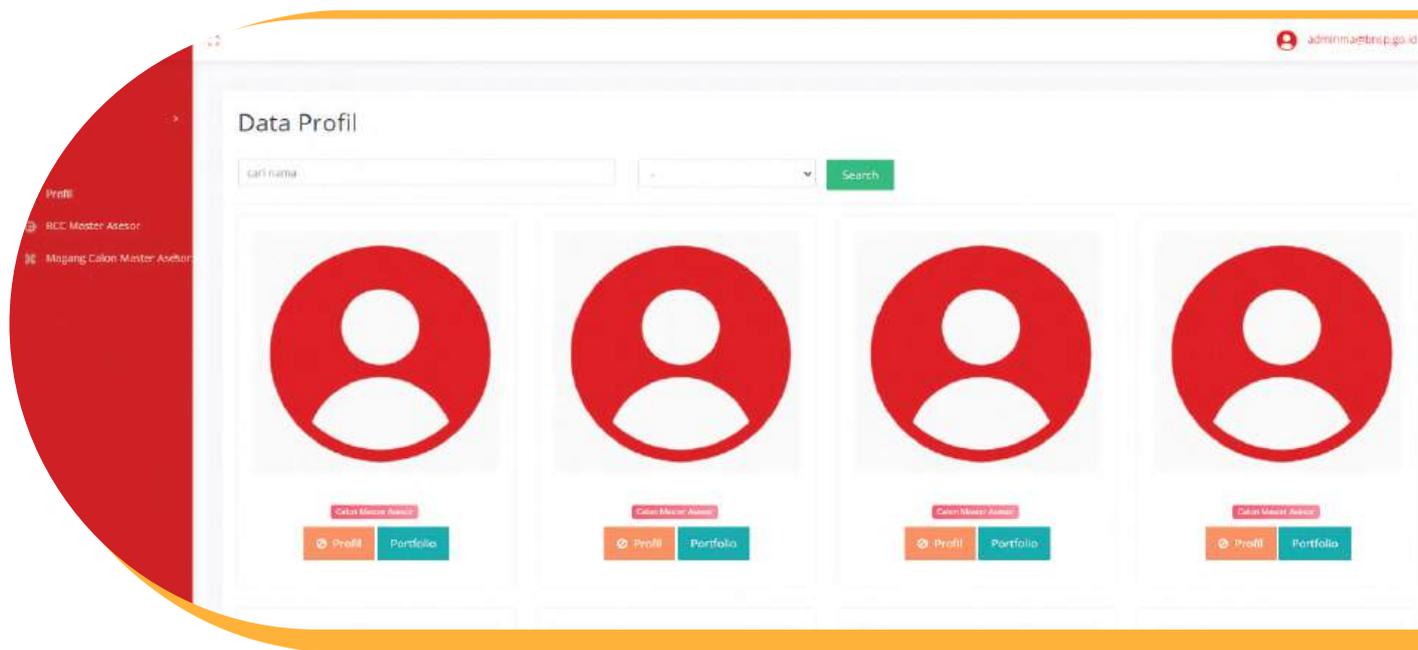


## 3. Pengembangan Situs Web

Ada dua sistem yang dikembangkan pada tahun 2021, yaitu

- a. Profil MA dan CMA;
- b. Laporan Magang CMA.

Sistem informasi ini bertujuan untuk memudahkan pendataan calon master asesor dan master asesor sehingga data-data yang dibutuhkan oleh BNSP dalam mengambil kebijakan terkait Master Asesor bisa dilihat di sistem informasi BNSP.



## E. Gambaran Kinerja Secara Umum

### 1. Kinerja Keuangan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih berlangsung pada tahun 2021 sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia berpengaruh pada kinerja keuangan BNSP. Penyerapan anggaran BNSP juga terkena imbas kondisi tersebut.

Anggaran BNSP terkoreksi hingga 40% dari pagu awal atau dari nominal Rp134.204.396.000. Revisi anggaran dari pagu awal menjadi menjadi Rp86.911.383.000. Penyesuaian anggaran ini tentu berdampak pada target pencapaian kinerja secara umum. Apabila dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya, anggaran tahun 2021 merupakan anggaran BNSP yang nominalnya paling kecil.

## Realisasi Anggaran Sekretariat BNSP Tahun 2021

Tabel 5. Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		FISIK
		PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	SEKRETARIAT BNSP	134.204.396.000	86.911.383.000	86.004.829.886	98,96	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>134.204.396.000</b>	<b>86.911.383.000</b>	<b>86.004.829.886</b>	<b>98,96</b>	<b>100,00</b>

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2019–2021

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2019	189.589.783.000	180.823.456.618	95,38	98,35
2	2020	152.509.806.000	148.098.429.857	97,11	98,54
3	2021	86.911.383.000	86.004.829.886	98,96	100,00

No	Kode>Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
			Realisasi Anggaran	Persentase
1.	2223   Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalavotas	18.202.116.000	17.808.874.343	97,84 %
2.	4053   Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	62.786.106.000	62.277.433.043	99,19 %
3.	4056   Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	3.050.000.000	3.047.962.500	99,93 %
4.	4473   Dukungan Manajemen Ditjen Binalavotas	2.873.161.000	2.870.560.000	99,91 %
	<b>TOTAL</b>	<b>86.911.383.000</b>	<b>86.004.829.886</b>	<b>98,96 %</b>

## 2. Sumber Daya Sertifikasi 2021

### ANGGARAN BNSP 2021

#### ALOKASI AWAL

Rp134.204.396.000

#### REVISI

Rp86.911.383.000

### REALISASI ANGGARAN BNSP 2021

#### REALISASI BELANJA

Rp86.004.829.886

#### PERSENTASE

98,96%

#### SISA ANGGARAN

Rp906.553.114

#### PERSENTASE

1,04%

# SEBARAN LSP BERDASARKAN WILAYAH

TOTAL 1.821 LSP



PROVINSI	JUMLAH
DI ACEH	27
SUMATRA UTARA	27
SUMATRA BARAT	49
RIAU	20
KEPULAUAN RIAU	16
BENGKULU	4
JAMBI	5
KEP. BANGKA BELITUNG	6
SUMATRA SELATAN	42
LAMPUNG	30
BANTEN	51
DKI JAKARTA	331
JAWA BARAT	298
JAWA TENGAH	273
JAWA TIMUR	346
DI YOGYAKARTA	71
BALI	55

PROVINSI	JUMLAH
NUSA TENGGARA BARAT	15
NUSA TENGGARA TIMUR	7
KALIMANTAN BARAT	12
KALIMANTAN UTARA	2
KALIMANTAN TENGAH	11
KALIMANTAN TIMUR	17
KALIMANTAN SELATAN	19
SULAWESI BARAT	13
SULAWESI SELATAN	32
SULAWESI TENGAH	5
SULAWESI TENGGARA	1
SULAWESI UTARA	10
GORONTALO	4
MALUKU	5
MALUKU UTARA	5
PAPUA	7
PAPUA BARAT	5

## SEBARAN MASTER ASESOR Tahun 2021

**TOTAL 114 ORANG**



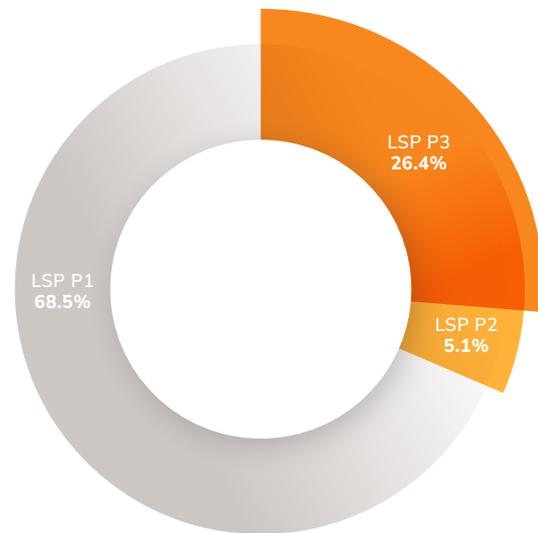
## SEBARAN ASESOR TAHUN 2021

**TOTAL 51.101**

PROVINSI	JUMLAH	PROVINSI	JUMLAH
DI ACEH	439	NUSA TENGGARA BARAT	399
SUMATRA UTARA	973	NUSA TENGGARA TIMUR	294
SUMATRA BARAT	1.435	KALIMANTAN BARAT	425
RIAU	750	KALIMANTAN UTARA	36
KEPULAUAN RIAU	448	KALIMANTAN TENGAH	179
BENGKULU	113	KALIMANTAN TIMUR	966
JAMBI	154	KALIMANTAN SELATAN	830
KEP. BANGKA BELITUNG	207	SULAWESI BARAT	153
SUMATRA SELATAN	847	SULAWESI SELATAN	1.608
LAMPUNG	715	SULAWESI TENGAH	57
BANTEN	1.779	SULAWESI TENGGARA	86
DKI JAKARTA	5.798	SULAWESI UTARA	377
JAWA BARAT	9.398	GORONTALO	74
JAWA TENGAH	7.527	MALUKU	200
JAWA TIMUR	9.687	MALUKU UTARA	67
DI YOGYAKARTA	2.254	PAPUA	275
BALI	1.653	PAPUA BARAT	96

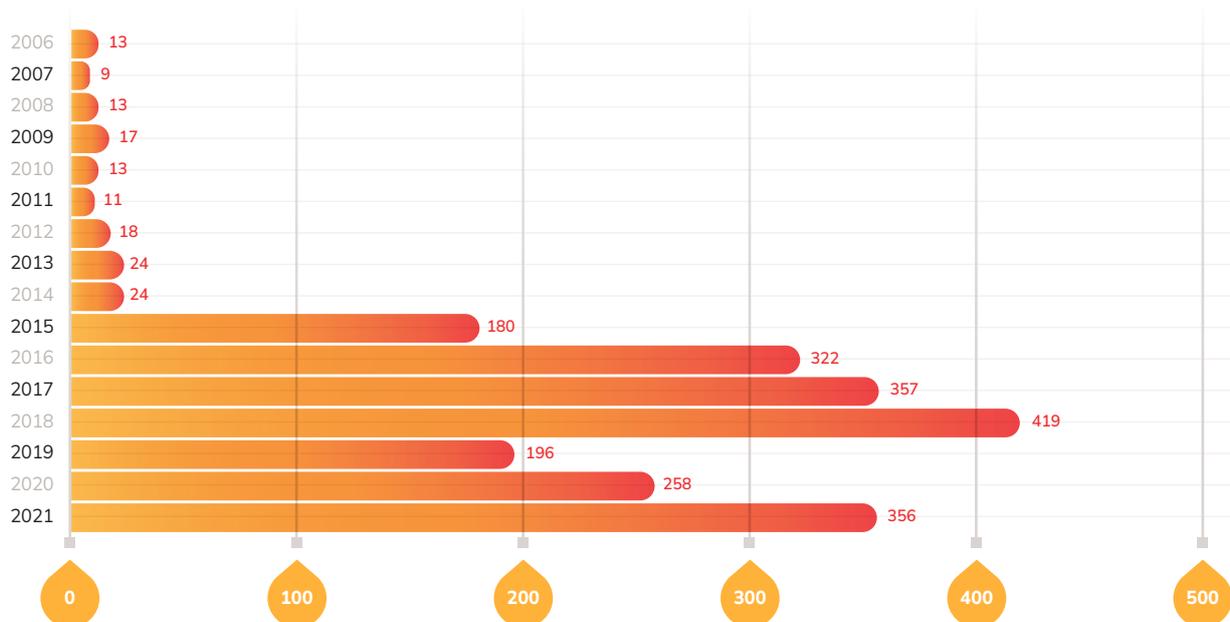
## LSP TERLISENSI TAHUN 2021 BERDASARKAN JENIS

LSP P1	122
LSP P2	9
LSP P3	47
<b>Total</b>	<b>356</b>



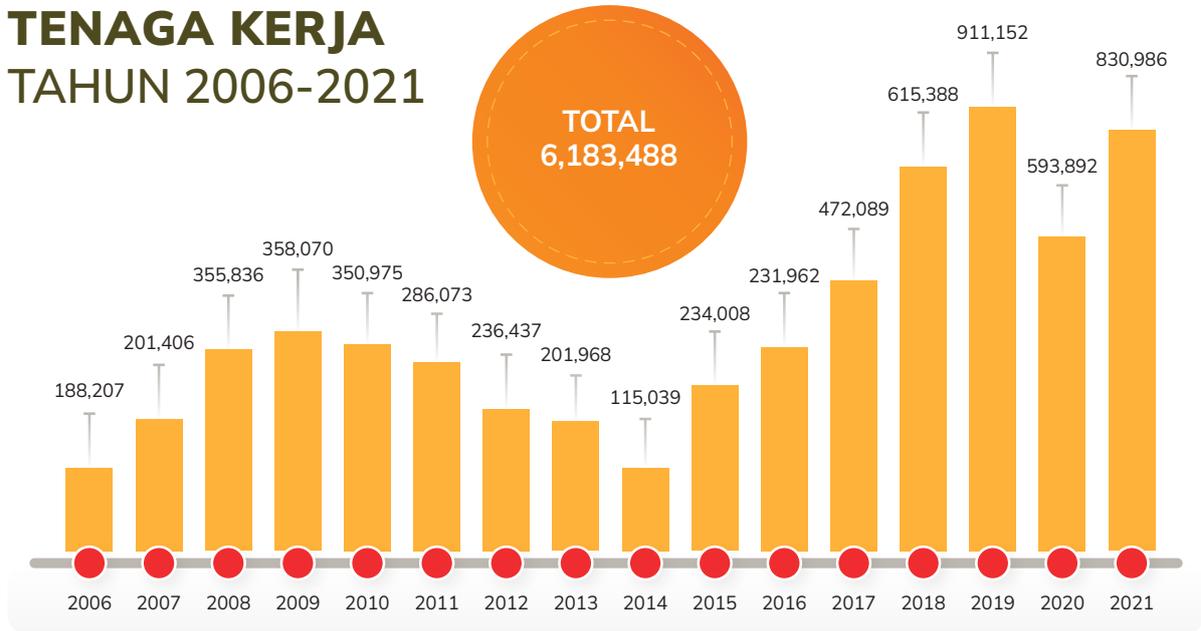
Sumber: Data BNSP, Desember 2021

## PERKEMBANGAN LSP TAHUN 2006–2021



Sumber: Data BNSP, Desember 2021

## SERTIFIKASI TENAGA KERJA TAHUN 2006-2021



Sumber: Data BNSP, Desember 2021



**BAB**

**IV**

**PENUTUP**



**D**emikian kami sampaikan Laporan Kinerja BNSP Tahun 2021 bertajuk “Sinergi Sertifikasi Kompetensi Melalui Harmonisasi” yang menyajikan upaya BNSP mendukung upaya Pemerintah memulihkan ekonomi pascapandemi global COVID-19. Dengan anggaran yang sangat terbatas, BNSP tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan di dalam PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

BNSP tetap berkomitmen menjalankan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional secara baik untuk menjawab tantangan pada masa depan. Karena itu, harmonisasi antarlembaga di berbagai sektor strategis dilakukan BNSP.

Laporan Kinerja BNSP Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menata langkah-langkah selanjutnya dalam rangka Program PEN dan amanat meningkatkan kompetensi SDM Indonesia. BNSP sangat terbuka dengan kritik dan saran yang dapat meningkatkan kinerja BNSP ke depan, terutama dari para pemangku kepentingan sertifikasi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung kinerja BNSP.

Ketua BNSP,

**Kunjung Masehat, S.H., M.M.**